

**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**DINAS KESEHATAN**

**Jalan Trikora-Wamena Telp. 0969-31142**



**"Membangun tanpa batas,  
Menepis perbedaan"**

**REVISI**

**RENCANA STRATEGI**

**DINAS KESEHATAN  
TAHUN 2018-2023**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabuapten Jayawijaya Tahun 2018-2023. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Jayawijaya menghadapi tantangan yang besar dan masalah yang semakin kompleks yang membutuhkan sumberdaya yang besar dan strategi yang mantap serta melibatkan berbagai komponen dan unsur pemangku kepentingan, sehingga perlu disusun suatu perencanaan yang baik, yang dapat membawah masyarakat Jayawijaya pada derajat kesehatan yang lebih baik.

Renstra Dinas Kesehatan Kabuapten Jayawijaya Tahun 2018-2023 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya 2018-2023 dan disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan lampirannya.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada penyusunan Renstra ini, semoga cita-cita dan harapan mewujudkan masyarakat Jayawijaya yang sejahtera, mandiri secara ekonomi, berkualitas dan berbudaya dapat terwujud. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa menyertai kita dalam mengemban tugas yang mulia ini.

Wamena, 9 Maret 2021

Kepala SKPD Dinas Kesehatan  
Kabupaten Jayawijaya,



**Dr. WILLY E. MAMBIEUW, Sp. B**  
NIP. 19681118 20012 1 003

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAWIJAYA</b> .....	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan .....	8
2.2 Sumber Daya Kesehatan .....	36
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan .....	43
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kesehatan .....	56
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN</b> .....	61
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan .....	61
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	67
3.3 Telaahan Rencana Strategi Kementerian Kesehatan RI .....	71
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) .....	75
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	78
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	85
4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ...	85
<b>BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b> .....	96
5.1 Strategi Dinas Kesehatan .....	96
5.2 Kebijakan Dinas Kesehatan .....	97

<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>105</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>119</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>123</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah dan Susunan Kepegawain Menurut Pangkat dan Golongan Tahun 2018 .....	37
Tabel 2	Jumlah dan Jenis Sumber Daya Manusia Tahun 2018 .....	37
Tabel 3	Jumlah dan Jenis Tenaga Menurut PNS dan Non PNS Tahun 2018	38
Tabel 4	Jumlah dan Jenis Fasilitas Kesehatan dan Jaringannya Tahun 2018	39
Tabel 5	Bidang Tanah Yang Digunakan Untuk Pelaksanaan Urusan Kesehatan Tahun 2018 .....	39
Tabel 6	Bangunan Yang Digunakan Untuk Pelaksanaan Urusan Kesehatan Tahun 2019 .....	40
Tabel 7	Jumlah Bangunan Rumah Dinas Tahun 2019 .....	41
Tabel 8	Jumlah Mobil Dinas Jabatan dan Kendaraan Puskesmas Keliling Tahun 2019 .....	42
Tabel 9	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan Tahun 2019 .....	43
Tabel 10	Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Jayawijaya .....	44
Tabel 11	Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Jayawijaya .....	44
Tabel 12	Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Jayawijaya .....	45
Tabel 13	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2018 .....	46
Tabel 14	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2018 .....	49
Tabel 15	Berbandingan Capaian Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya terhadap Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Papua dan Sasaran Renstra Kementrian/Lembaga (K/L) .....	59
Tabel 16	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan .....	62
Tabel 17	Perumusan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 .....	69

Tabel 18	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	70
Tabel 19	Sasaran Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019 .....	74
Tabel 20	Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Tata Ruang Wilayah dan KLHS Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	78
Tabel 21	Indikator Sasaran Urusan Kesehatan RPJMD Tahun 2018-2023 ...	86
Tabel 22	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023 .....	89
Tabel 23	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan .....	99
Tabel 24	Rencana Program dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 .....	107

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Alur Kerangka Pikir Penyusunan Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya .....	3
Gambar 2	Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya .....	13

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### 1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap OPD di Propinsi Papua berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Rennstra) OPD Dinas Kesehatan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan OPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah. Untuk itu sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan, OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023.

Pemberlakuan otonomi khusus di Propinsi Papua telah banyak memberikan warna dan perubahan diberbagai sendi kehidupan masyarakat, meskipun belum dapat menyentuh permasalahan pembangunan secara substantif untuk mengurangi ketertinggalan dan ketimpangan pembangunan antar daerah. Untuk itu diperlukan satu kajian yang mendalam untuk memperbaiki pelaksanaan otonomi khusus di Kabupaten Jayawijaya sehingga dapat lebih fokus pada upaya pengurangan ketimpangan pembangunan dengan memperkokoh pada aspek kemandirian orang asli Papua dalam kapasitas ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya sektor kesehatan tahun 2018-2023 sektor kesehatan yaitu Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang dapat menjangkau dan melayani

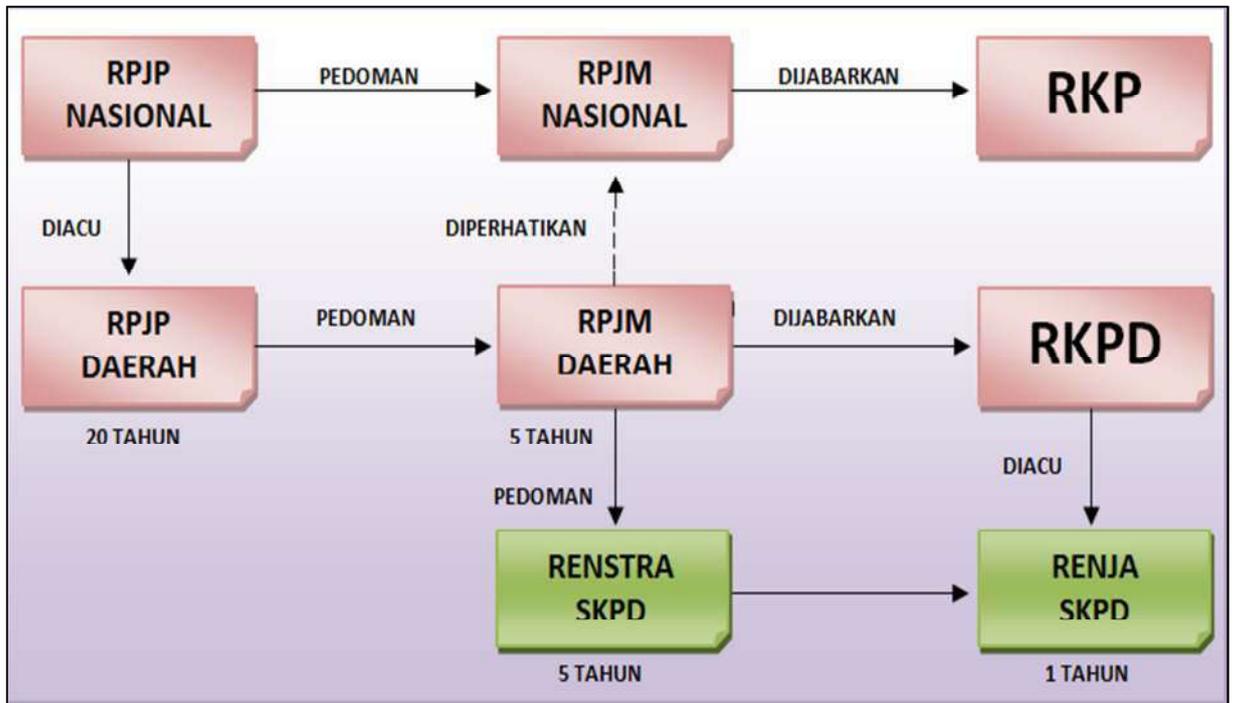
masyarakat Kabupaten Jayawijaya dengan menitikberatkan pada upaya pencegahan penyakit dan kebijakan biaya kesehatan yang serendah rendahnya. Selain itu pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan yang berkesinambungan baik oleh Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten, masyarakat dan swasta.

Pembangunan kesehatan secara berkesinambungan tersebut dalam beberapa tahun terakhir ini telah cukup berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Jayawijaya hal ini dapat dilihat dari rata-rata Umur Harap Hidup (UHH) masyarakat Jayawijaya yang setiap tahun mengalami trend peningkatan. Namun kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Propinsi Papua masih terhitung rendah, hal ini disebabkan masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan, belum meratanya sarana dan tenaga pelayanan kesehatan sehingga masyarakat sulit untuk mengakses layanan kesehatan, dan yang sangat penting adalah kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan yang masih sangat rendah

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya disusun berdasarkan hasil pemikiran dan komitmen bersama dari segenap karyawan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya dengan berbasiskan data yang akurat berupa aspek kinerja layanan, keuangan, SDM dan aspek lainya yang relepan dan dianggap penting.

Selain itu Renstra Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan kesehatan yang akan langsung dilaksanakan oleh OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya dengan mendorong aktif masyarakat untuk terlibat langsung dalam pelayanan kesehatan sehingga akan terwujud masyarakat jayawijaya mandiri dibidang kesehatan kurung waktu 2018-2023. Kedudukan Rencana Strategis OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya dapat di gambarkan pada bagan alur dibawah ini.

Gambar 1. Alur Kerangka Pikir Penyusunan Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya



## 1.2. LANDASAN HUKUM

Landsan hokum yang digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen Rencana Strategis OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya sebagai berikut :

- 1) Undang- undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 4) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
- 7) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 8) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816)
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- 15) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
- 16) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
- 17) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 18) Peraturan Menteri Kesehatan RI, Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
- 19) Peraturan Menteri Kesehatan RI, Nomor 03.01/160/II/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 21) Keputusan Menteri Kesehatan RI, Nomor 1202/MENKES/SK/VIII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten/Kota

- 22) Keputusan Menteri Kesehatan RI, Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2011
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2005-2025
- 26) Bupati Jayawijaya Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana strategis OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya 2018-2023 disusun dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan kesehatan yang berkesinambungan.

#### a. Maksud

Renstra OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi/dasar hukum/pedoman bagi kesehatan serta menyediakan tolok ukur untuk OPD Kesehatan dalam menjabarkan kinerja pelayanan kesehatan

#### b. Tujuan

Renstra OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya disusun dengan tujuan memberikan arah dan pedoman bagi kesehatan dalam menyusun Rencana

Kerja Tahunan (RENJA) dan berbagai kebijakan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Jayawijaya dalam kurung waktu lima tahun.

#### **1.4. SISTEMATIKAN PENULISAN**

Renstra OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya terdiri dari 8 (delapan) bab dengan perincian sebagai berikut ;

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAWIJAYA**

Bab ini menjelaskan tentang struktur organisasi, susunan kepegawaian, dan kelengkapan, tugas pokok, tugas fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya.

##### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS OPD DINAS KESEHATAN**

Bab ini berisikan tentang perumusan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan bidang kesehatan, telaan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Telaahan tata rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Jayawijaya. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi, serta penentuan isu-isu strategis OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya

##### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAWIJAYA**

Bab ini berisikan tentang penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan jangka menengah Dinas Kesehatan Jayawijaya tahun 2018-2023.

##### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAWIJAYA**

Bab ini menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023

## **BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Bab ini menguraikan rencana program, kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023

## **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAWIJAYA**

Bab ini menjelaskan tentang indikator kinerja OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya yang akan dicapai pada tahun 2018-2023 mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Jayawijaya.

## **BAB VIII. PENTUP**

Berisikan fungsi renstra, langkah-langkah yang akan dilaksanakan OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya dalam mengimplementasikan Renstra serta harapan-harapan yang diharapkan guna tercapainya visi dan misi OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya.

# BAB II

## GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

---

### 2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DNAS KESEHATAN

Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, maka pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya dengan tugas pokok adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan serta berdasarkan pada kewenanganyang dimiliki Pemerintah Daerah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya dapat di jabarkan sebagai berikut :

#### 2.1.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

- 1) Kedudukan
  - a. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Kabupaten Jayawijaya;
  - b. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- 2) Tugas Pokok

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jayawijaya.

### 3) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan Bupati ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.1.2. Organisasi

- 1) Unsur Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari ;
  - a. Kepala
  - b. Sekertaris
  - c. Bidang
  - d. Kelompok Jabatab Fungsional
  - e. UPTD
- 2) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Keuangan

3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
  - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
    1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
    2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
    3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
  - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :
    1. Seksi Surveilans dan Imunisasi
    2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
    3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
  - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
    1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
    2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
    3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
  - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
    1. Seksi Kefarmasian
    2. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
    3. Seksi Sumber daya Manusia Kesehatan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
  - h. UPTD
- 3) Tata Kerja
- a. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin satuan unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan serta instansi lain sesuai tugas masing-masing
  - b. Setiap pemimpin satuan unit organisasi wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - c. Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya

- d. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan unit organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

#### 4) Pelaporan

- a. Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya
- b. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan
- c. Kepala, Sekertaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing
- d. Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### 5) Ha Mewakili

Dalam hal Kepala berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala dapat menunjuk seorang Sekertaris dan dalam hal Sekertaris berhalangan pula, Kepala dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya dan atau sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 6) Kepegawaian

- a. Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
- b. Kepala berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan penentuan dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Bupati dibidang kepegawaian

c. Ketentuan-ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

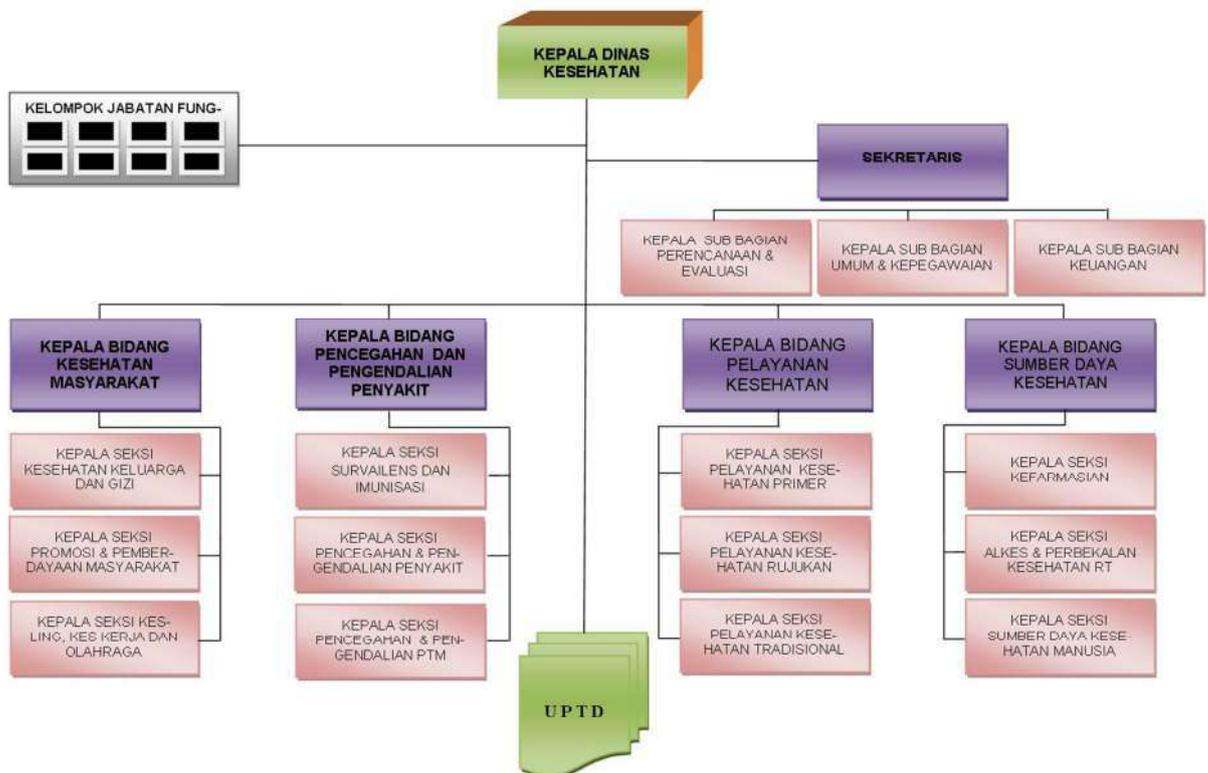
7) Pembiayaan

Pembiayaan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

8) Bagan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya struktur organisasi dapat diuraikan sebagai berikut ;

Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya



### 2.1.3. Uraian Tugas

#### 1) Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kesehatan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi ;
  1. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan masyarakat;
  2. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
  3. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan;
  4. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang sumber daya kesehatan;
  5. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang tata usaha, perlengkapan/asset, keuangan dan kepegawaian
  6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 2). Sekretaris

- a. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, keuangan, Perencanaan dan evaluasi.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keuangan Dinas;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi Dinas;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi ;

a. Sub Bagian Umum dan Kepagawaian

1. Sub Bagian Umum dan Kepagawaian mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepagawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a) menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
  - b) menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
  - c) menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
  - d) melaksanakan administrasi persuratan, kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
  - e) mengelola sarana dan prasarana perkantoran, melakukan urusan rumah tangga, protocol dan kehumasan Dinas;
  - f) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi, pemusnahan dan penghapusan barang;

- g) menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi usul kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilaian pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin, masa kerja, peralihan status, dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
  - h) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
  - i) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Sub Bagian Keuangan
1. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang pengelolaan urusan keuangan.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
    - a) menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang keuangan;
    - b) menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan;
    - c) menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang keuangan;
    - d) melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan, akuntansi dan pelaporan;
    - e) mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan laporan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional;
    - f) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;

- g) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang perencanaan dan penganggaran, tata laksana dan kerja sama.
  - 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
    - a) menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama;
    - b) menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama;
    - c) menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama;
    - d) menyusun dokumen perencanaan, meliputi Renstra, Rencana kerja, RKA, RKT, pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta LAKIP, LPPD dan laporan lainnya Dinas;
    - e) menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan tatalaksana dan kerjasama;
    - f) menyiapkan bahan perumusan bahan koordinasi bidang perencanaan kesehatan dengan instansi terkait baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota dan lintas sektoral;
    - g) menyiapkan bahan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan dinas Kesehatan;
    - h) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;

- i) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3) Bidang Kesehatan Masyarakat

1. Bidang Bidang Kesehatan Masyarakat, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas Kesehatan di bidang kesehatan masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Bidang Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi:

- a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
  1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dalam bidang penyusunan, pemantauan dan evaluasi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
    - a) mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
    - b) mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;

- c) menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
  - d) menyiapkan bahan penetapan kebijakan operasional pelayanan kesehatan keluarga dan gizi sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan;
  - e) menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan serta koordinasi dalam penerapan standar pelayanan kesehatan keluarga dan gizi yang meliputi kesehatan ibu dan bayi baru lahir, kesehatan balita dan anak prasekolah, kesehatan anak usia sekolah dan remaja, kesehatan usia subur, kesehatan usia lanjut serta penerapan standar pelayanan di bidang kesehatan keluarga yang akan dilaksanakan oleh masyarakat;
  - f) melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam penerapan standar pelayanan kesehatan;
  - g) melaksanakan fasilitasi pelayanan kesehatan keluarga dan gizi;
  - h) menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan dan koordinasi dalam penerapan standar dan sertifikasi teknologi pelayanan gizi yang meliputi : pelayanan gizi makro, pelayanan gizi mikro, pelayanan gizi institusi, pembinaan konsumsi makanan, kewaspadaan pangan dan gizi serta jaringan informasi pangan dan gizi serta penerapan standar pelayanan gizi yang dilaksanakan oleh masyarakat;
  - i) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
  - j) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
1. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Kesehatan

Masyarakat dalam bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat.

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a) mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang promosi dan pemberdayaan masyarakat;
  - b) mengumpulkan, mensistемasikan dan mengolah data dalam bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat;
  - c) menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat;
  - d) menyiapkan bahan penetapan kebijakan operasional penyelenggaraan promosi kesehatan dan pemberdayaan sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan;
  - e) melaksanakan bimbingan, penyuluhan, kampanye kesehatan serta penyebarluasan informasi mengenai program kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat melalui organisasi masyarakat, instansi pemerintah dan swasta skala kabupaten;
  - f) mengembangkan metode dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan kualitas promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
  - g) melaksanakan kemitraan dengan mitra kerja dan pembinaan dalam upaya meningkatkan promosi kesehatan dan pencapaian perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
  - h) melaksanakan bimbingan pengembangan pengobatan tradisional dan membangun partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan serta memberdayakan masyarakat dalam peningkatan pemanfaatan pekarangan;
  - i) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;

- j) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Olah Raga
- 1. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Kesehatan Masyarakat dalam bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
  - 2. Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
    - a) mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
    - b) mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
    - c) menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
    - d) melaksanakan pembinaan teknis operasional penyehatan lingkungan penyehatan air, kesehatan kerja dan olah raga;
    - e) melaksanakan pemantauan kesehatan lingkungan pra dan pasca bencana serta sanitasi daerah serta pembinaan dan pengawasan tempat-tempat umum, tempat pengolahan makanan dan air;
    - f) menyelenggarakan pemetaan pencemaran lingkungan yang berpotensi mengganggu kesehatan lingkungan;
    - g) melaksanakan koordinasi pembinaan lintas program dan lintas sektor dalam penyehatan lingkungan dan penyehatan air serta melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan tempat-tempat penyimpanan pestisida dan bahan berbahaya lainnya;
    - h) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan

kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;

- i) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

1. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas Kesehatan di bidang pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi:
  - a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi;
  - b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
  - c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa;

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi:

##### a. Seksi Surveilans dan Imunisasi

1. Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam bidang kebijakan surveilans dan imunisasi.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a) mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang surveilans dan imunisasi;

- b) mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang surveilans dan imunisasi;
  - c) menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang surveilans dan imunisasi;
  - d) menyiapkan bahan penetapan kebijakan operasional Surveilans dan Imunisasi sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan;
  - e) menyiapkan kegiatan operasional kegiatan monitoring dan evaluasi imunisasi rutin dan insidental pada Puskesmas, Posyandu, sekolah dan unit pelayanan kesehatan lainnya;
  - f) menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengamatan (surveilans epidemiologi) tindakan saat terjadinya wabah penyakit/kejadian luar biasa;
  - g) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang surveilans dan imunisasi, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
  - h) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
    - a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
    - b. mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;

- c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
  - d. menyiapkan bahan penetapan kebijakan operasional pencegahan dan pengendalian penyakit menular sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan;
  - e. menyiapkan bahan perencanaan dan melaksanakan upaya preventif pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
  - f. melaksanakan fasilitasi kegiatan penanganan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
  - g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular (termasuk faktor resiko);
  - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
  - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa
1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam bidang pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
    - a) mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa;

- b) mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa;
- c) menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa;
- d) menyiapkan bahan perencanaan dan melaksanakan upaya preventif pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- e) melaksanakan fasilitasi kegiatan penanganan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- f) melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan kesehatan jiwa (termasuk faktor resiko);
- g) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- h) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 5). Bidang Pelayanan Kesehatan

1. Bidang Bidang Pelayanan Kesehatan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
  - a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer;

- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional;

Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi:

a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dalam bidang pelayanan kesehatan primer.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Pelayanan kesehatan primer mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a) mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pelayanan kesehatan primer;
  - b) mengumpulkan, mensistемasikan dan mengolah data dalam bidang pelayanan kesehatan primer;
  - c) menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan kesehatan primer;
  - d) menyiapkan bahan penetapan kebijakan operasional pelayanan kesehatan primer sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan;
  - e) menyiapkan bahan perencanaan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan dalam penerapan upaya dan standar pelayanan kesehatan primer;
  - f) memberikan fasilitasi pelayanan medik dasar/kegiatan pertolongan pertama pada kecelakaan serta melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi dalam penerapan standar pelayanan kesehatan primer;
  - g) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan primer, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan

pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;

- h) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dalam bidang pelayanan kesehatan rujukan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a) mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pelayanan kesehatan rujukan;
  - b) mengumpulkan, mensistемasikan dan mengolah data dalam bidang pelayanan kesehatan rujukan;
  - c) menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan kesehatan rujukan;
  - d) menyiapkan bahan penetapan kebijakan operasional pelayanan kesehatan rujukan sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan;
  - e) melaksanakan koordinasi dan pengawasan dalam penerapan upaya pelayanan kesehatan rujukan dan penerapan standar pengobatan pelayanan kesehatan rujukan;
  - f) memberikan fasilitasi pelayanan medik dasar/kegiatan pertolongan pertama pada kecelakaan serta melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi dalam penerapan standar pelayanan kesehatan rujukan;
  - g) menyiapkan bahan perencanaan pelaksanaan, koordinasi dan pengawasan dalam penerapan upaya pelayanan kesehatan rujukan serta penerapan standar pengobatan pelayanan kesehatan rujukan;
  - h) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan rujukan, memberikan saran pertimbangan kepada

atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;

- i) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dalam bidang pelayanan kesehatan tradisional.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a) mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
  - b) mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang fasilitas pelayanan kesehatan tradisional;
  - c) menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang fasilitas pelayanan kesehatan tradisional;
  - d) menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian penentuan kriteria baku fasilitas pelayanan kesehatan tradisional;
  - e) menyiapkan bahan penetapan kebijakan operasional pelaksanaan fasilitas kesehatan tradisional sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan;
  - f) menyiapkan bahan perencanaan pelaksanaan, koordinasi dan pengawasan dalam penerapan upaya dan standar fasilitas pelayanan kesehatan tradisional;
  - g) menyiapkan bahan koordinasi, monitoring, dan evaluasi dalam penerapan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional serta penerapan standar peningkatan mutu kesehatan tradisional;
  - h) menyiapkan bahan perencanaan pengelolaan dan sistem fasilitasi pelayanan kesehatan tradisional;

- i) membentuk jaringan kemitraan peningkatan mutu serta melakukan pengumpulan data, pengolahan, analisis dan penyajian informasi fasilitas kesehatan tradisional;
- j) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan tradisional, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- k) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 6) Bidang Sumber Daya Kesehatan

1. Bidang Sumber Daya Kesehatan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang sumber daya kesehatan.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
  - a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kefarmasian;
  - b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang alat kesehatan dan PKRT;
  - c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan;

Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahi:

##### a. Seksi Kefarmasian

1. Seksi Kefarmasian membantu sebagian tugas Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam bidang kefarmasian.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi kefarmasian, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a) mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang kefarmasian;
- b) mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang kefarmasian;
- c) menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang kefarmasian;
- d) menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional pengelolaan farmasi;
- e) menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis, pengendalian, serta evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan farmasi komunitas dan farmasi klinik, penggunaan obat tradisional dan obat essensial nasional;
- f) melaksanakan pengadaan dan pengelolaan obat publik untuk pelayanan kesehatan dasar serta perbekalan kesehatan, penggunaan obat asli Indonesia, produk simplisia obat asli Indonesia, usaha kecil dan menengah obat asli Indonesia serta pengembangannya;
- g) menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis produksi, pengadaan, distribusi dan penggunaan obat, obat tradisional, kosmetika;
- h) menyiapkan bahan rekomendasi pemberian ijin apotik dan toko obat serta melaksanakan pengelolaan (meliputi pengadaan, pendistribusian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) obat;
- i) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang kefarmasian, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- j) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
- 1) Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, membantu sebagian tugas Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam bidang alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.
  - 2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
    - a) mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
    - b) mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
    - c) menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
    - d) menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional pengelolaan alat kesehatan;
    - e) menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis, pengendalian, serta evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang alat kesehatan;
    - f) melaksanakan pengadaan alat dan perbekalan kesehatan, penggunaan obat asli Indonesia, produk simplisia obat asli Indonesia, usaha kecil dan menengah obat asli Indonesia serta pengembangannya;
    - g) melaksanakan pengawasan alat dan perbekalan kesehatan serta perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga;
    - h) menyiapkan bahan (meliputi pengadaan, pendistribusian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) alat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan;
    - i) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga,

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;

j) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

1. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, membantu sebagian tugas Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan di bidang sumber daya manusia kesehatan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a) mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang sumber daya manusia kesehatan;
  - b) mengumpulkan, mensistемasikan dan mengolah data serta informasi dalam bidang sumber daya manusia kesehatan;
  - c) menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang sumber daya manusia kesehatan;
  - d) menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional pengelolaan sumber daya manusia kesehatan;
  - e) menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis, pengendalian, serta evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang sumber daya kesehatan;
  - f) melaksanakan perhitungan kebutuhan sumber daya kesehatan pada setiap unit layanan beserta pengembangannya;
  - g) melakukan pendataan dan menyiapkan data sumber daya manusia kesehatan pada setiap unit layanan;
  - h) memfasilitasi pengurusan STR;
  - i) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai

bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;

j) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 7). Unit Pelaksana Teknis

1. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lapangan, maka di lingkungan Dinas Kesehatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan dan beban kerja atas usul Kepala Dinas;
2. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur tersendiri bersamaan dengan pembentukan organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kesehatan.

#### 8). Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
3. Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
4. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Uraian tugas kelompok jabatan fungsional, adalah sebagai berikut :
  - a) menjabarkan program kerja yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan kepala UPTD;
  - b) melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki.

- c) memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala dinas dan Kepala UPTD baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan keahliannya.
- d) mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas Kesehatan dan UPTD dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- e) menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut.
- f) membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas dan Kepala UPTD sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Kepala UPTD sesuai ketentuan yang berlaku.

#### 9) Tata Kerja

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungannya serta dengan instansi lain sesuai tugas masing-masing. Sebagai berikut ;

1. Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

#### 10) Pelaporan

1. Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
2. Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
3. Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.
4. Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### 11) Hal Mewakili

Dalam hal Kepala berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala dapat menunjuk Sekretaris dan dalam hal Sekretaris berhalangan pula, Kepala dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya dan atau sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2.2. SUMBER DAYA DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti sumber daya tenaga, keuangan, sarana dan prasarana, serta obat dan berbekalan kesehatan.

## 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Tabel 1. Jumlah dan Susunan Kepegawain Menurut Pangkat dan Golongan Tahun 2018

No	Uraian	Jenis Golongan				Jumlah
		a	b	C	d	
1	Golongan I	18	1	18	3	38
2	Golongan II	36	32	95	46	209
3	Golongan III	51	64	38	37	190
4	Golongan IV	8	3	1		12

**Sumber Data** : Profil Dinas Kesehatan Kab. Jayawijaya Tahun 2018

Tabel 2. Jumlah dan Jenis Sumber Daya Manusia Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah
1	Dokter Umum	28
2	Dokter Gigi	8
3	Perawat	142
4	Bidan	105
5	Gizi	13
6	Kesehatan Masyarakat	46
7	Kesehatan Lingkungan	10
8	Farmasi/Apoteker	13
9	Analisis Kesehatan	8
	<b>Jumlah</b>	<b>373</b>

**Sumber Data** : Profil Dinas Kesehatan Kab. Jayawijaya Tahun 2019

Tabel 3. Jumlah dan Jenis Tenaga Menurut PNS dan Non PNS  
Tahun 2018

No	Jenis Tenaga	Dinas Kesehatan	
		ASN	Non ASN
1	SD	18	
2	SMP	24	
3	SMA	42	
4	SMK	6	
5	Sosial	1	
6	Ekonomi	2	
7	Tehknik	1	
8	Kefarmasin	4	
9	Kebidanan	105	
10	Keperawatan	142	28
11	Kesehatan Lingkungan	10	
12	Rekam Medik	1	
13	Gizi	12	1
14	Analisis	8	8
15	Perawat Gigi	2	
16	Kedokteran Umum	13	15
17	Kedokteran Gigi	6	2
18	Kesehatan Masyarakat	46	1
19	Apoteker	6	5
20	Kedokteran Spesial	1	
	<b>Jumlah</b>	<b>449</b>	<b>60</b>

Tabel 3. Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Fungsional  
Tahun 2018

No.	Jenis Pendidikan Diklat	Jumlah
1	Perencanaan	5
3	Pendidikan Kebendaharaan APBD	4
4	Kursus Manajemen Projek	20
5	Pemegang Kas	5
6	Kearsipan	
7	Tata Naskah Dinas	
	<b>Jumlah</b>	<b>34</b>

## 2.2.2. Sarana Dan Prasarana

Tabel 4. Jumlah dan Jenis Fasilitas Kesehatan dan Jaringannya  
Tahun 2018

No.	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit Umum Daerah	1
2	Puskesmas Rawat Inap	2
3	Puskesmas Non Rawat Inap	24
4	Puskesmas Pembantu	
5	Pondok Bersalin (Polindes)	
6	Klinik	3
7	Apotik	34
8	Posyandu	233

Tabel 5. Bidang Tanah Yang Digunakan Untuk Pelaksanaan  
Urusan Kesehatan Tahun 2018

No.	Jenis Fasilitas	Luas Tanah m2	Nilai Aset (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1	Gedung Dinas Kesehatan			Sertifikat
2	Gedung Farmasi			Sertifikat
3	Gedung Rumah Sakit			Sertifikat
4	Puskesmas Wamena Kota			Belum
5	Puskesmas Wesaput			Belum
6	Puskesmas Hom-Hom			Sertifikat
7	Puskesmas Elekma			Belum
8	Puskesmas Asolokobal			Belum
9	Puskesmas Asotipo			Belum
10	Puskesmas Maima			Belum
11	Puskesmas Walesi			Belum
12	Puskesmas Walelagama			Belum
13	Puskesmas Itlay Hisage			Belum
14	Puskesmas Siepkosi			Belum
15	Puskesmas Pelabaga			Belum
16	Puskesmas Hubikosi			Belum
17	Puskesmas Asologaima			Belum
18	Puskesmas Piramid			Belum
19	Puskesmas Musatfak			Belum
20	Puskesmas Witawaya			Belum
21	Puskesmas Libarek			Belum

**Sumber Data** : Bagian Aset Dinas Kesehatan Kab. Jayawijaya Tahun 2019

1	2	3	4	5
22	Puskesmas Libarek			Belum
23	Puskesmas Kurulu			Belum
24	Puskesmas Usilimo			Belum
25	Puskesmas Yalengga			Belum
26	Puskesmas Wolo			Belum
27	Puskesmas Bugi			Belum
28	Puskesmas Malagalome			Belum
29	Puskesmas Bolakme			Belum
30	Puskesmas Tagime			Belum

**Sumber Data** : Bagian Aset Dinas Kesehatan Kab. Jayawijaya Tahun 2019

Tabel 6. Bangunan Yang Digunakan Untuk Pelaksanaan Urusan Kesehatan Tahun 2019

No.	Jenis Fasilitas	Luas Bangunan m2	Nilai Aset (Rp)
1	2	3	4
1	Gedung Dinas Kesehatan		
2	Gedung Bidang SDK	45	
3	Gedung URC119	750	
4	Gedung Rumah Sakit		
5	Puskesmas Wamena Kota	475	
6	Puskesmas Wesaput	250	
7	Puskesmas Hom-Hom	552	
8	Puskesmas Elekma	250	
9	Puskesmas Asolokobal	250	
10	Puskesmas Asotipo	250	
11	Puskesmas Maima	200	
12	Puskesmas Walesi	250	
13	Puskesmas Walelagama	900	
14	Puskesmas Itlay Hisage	250	
15	Puskesmas Siepkosi	250	
16	Puskesmas Pelabaga	250	
17	Puskesmas Hubikosi	200	
18	Puskesmas Asologaima	250	
19	Puskesmas Rawat Inap Asologaima	750	
20	Puskesmas Piramid	250	
21	Puskesmas Musاتفak	250	
22	Puskesmas Witawaya	250	
23	Puskesmas Libarek	200	
24	Puskesmas Kurulu Lama	250	
25	Puskesmas Kurulu Baru	250	
26	Puskesmas Usilimo	200	
27	Puskesmas Yalengga Lama	200	
28	Puskesmas Yalengga Baru	900	
29	Puskesmas Wolo		

1	2	3	4
30	Puskesmas Bugi	200	
31	Puskesmas Malagalome	200	
32	Puskesmas Bolakme	250	
33	Puskesmas Rawat Inap Bolakme	900	
34	Puskesmas Tagime	250	

**Sumber Data** : Bagian Aset Dinas Kesehatan Kab. Jayawijaya Tahun 2019

Tabel 7. Jumlah Bangunan Rumah Dinas Tahun 2019

No.	Nama Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Rumah Dinas		Nilai Aset (Rp)
		Dokter	Paramedis	
1	Puskesmas Wamena Kota	-	-	
2	Puskesmas Wesaput	-	-	
3	Puskesmas Hom-Hom	-	9	
4	Puskesmas Elekma	2	2	
5	Puskesmas Asolokobal	-	4	
6	Puskesmas Asotipo			
7	Puskesmas Maima			
8	Puskesmas Walesi		2	
9	Puskesmas Walelagama	1	9	
10	Puskesmas Itlay Hisage	-	-	
11	Puskesmas Siepkosi	-	-	
12	Puskesmas Pelabaga	-	4	
13	Puskesmas Hubikosi	-	6	
14	Puskesmas Asologaima	2	8	
15	Puskesmas Piramid	-	-	-
16	Puskesmas Musatfak	1	4	
17	Puskesmas Witawaya	-	2	
18	Puskesmas Libarek	-	2	
19	Puskesmas Kurulu	1	8	
20	Puskesmas Usilimo	-	-	
21	Puskesmas Yalengga	2	4	
22	Puskesmas Wolo	1	4	
23	Puskesmas Bugi	-	-	
24	Puskesmas Malagalome	-	2	
25	Puskesmas Bolakme	2	4	
26	Puskesmas Tagime	-	-	
	<b>Jumlah</b>	12	74	

**Sumber Data** : Bagian Aset Dinas Kesehatan Kab. Jayawijaya Tahun 2019

Tabel 8. Jumlah Mobil Dinas Jabatan dan Kendaraan Puskesmas Keliling Tahun 2019

No.	Nama Puskesmas	Kendaraan Dinas Jabatan dan Pusling	
		Roda 4	Roda 2
1	Dinas Kesehatan		
2	Puskesmas Wamena Kota	1	
3	Puskesmas Wesaput		1
4	Puskesmas Hom-Hom	1	2
5	Puskesmas Elekma	1	1
6	Puskesmas Asolokobal	1	1
7	Puskesmas Asotipo	1	1
8	Puskesmas Maima		1
9	Puskesmas Walesi		
10	Puskesmas Walelagama	1	2
11	Puskesmas Itlay Hisage	1	1
12	Puskesmas Siepkosi		1
13	Puskesmas Pelabaga	1	2
14	Puskesmas Hubikosi	1	3
15	Puskesmas Asologaima	1	2
16	Puskesmas Piramid		-
17	Puskesmas Musatfak	1	1
18	Puskesmas Witawaya		
19	Puskesmas Libarek		
20	Puskesmas Kurulu	1	3
21	Puskesmas Usilimo	1	
22	Puskesmas Yalengga	1	1
23	Puskesmas Wolo	1	2
24	Puskesmas Bugi		
25	Puskesmas Malagalome		
26	Puskesmas Bolakme	1	1
	<b>Jumlah</b>	16	26

*Sumber Data* : Bagian Aset Dinas Kesehatan Kab. Jayawijaya Tahun 2019

### 2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN

Sasaran dari program ini adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yang merupakan indikator bidang kesehatan, yaitu ;

### 2.3.1. Indikator Bidang Kesehatan

#### 1) Angka Kematian Ibu, Bayi dan Anak Balita

Angka kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup menggambarkan jumlah kematian ibu pada setiap 100.000 kelahiran. Dalam penyusunan Renstra ini kesulitan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan adalah mendapatkan angka Kematian Ibu yang dipergunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Jayawijaya, hal ini dikarenakan antara lain permasalahan pada sistem pelaporan berjenjang dari masyarakat ke aparat kampung yang tidak berfungsi dengan baik, selain itu jumlah kelahiran hidup ibu di Kabupaten Jayawijaya tidak mencapai 100.000 kelahiran hidup. Dalam tabel berikut ini perhitungan kelahiran hidup menggunakan angka riil berdasarkan laporan rutin Puskesmas.

Berikut gambaran kematian Ibu di Kabupaten Jayawijaya yang bersumber dari laporan rutin Puskesmas dari tahun 2013-2018, yaitu sebagai berikut ;

Tabel 10. Jumlah Kematian Ibu, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Jayawijaya

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Kematian Ibu	4	12	14	13	7
Jumlah Kematian Bayi	16	9	45	18	7
Jumlah Kematian Balita	17	4	21	7	15

**Sumber Data** : Bidang Kesehatan Masyarakat

Dari tabel 10 tersebut diatas tidak menggambarkan angka kematian ibu, bayi dan balita yang sesungguhnya di Kabupaten Jayawijaya karena hanya diperoleh dari laporan rutin beberapa Puskesmas (persentase laporan rendah). Namun demikian dengan kemajuan pembangunan selama periode 5 tahun terakhir, sehingga

dapat dinyatakan bahwa derajat kesehatan ibu dan anak telah meningkat.

### 3) Balita Dengan Status Gizi Buruk

Balita dengan status gizi buruk dihitung berdasarkan berat badan balita dibandingkan dengan tinggi badan balita (BB/TB). Berdasarkan hasil laporan rutin Puskesmas persentase status gizi buruk balita di Kabupaten Jayawijaya tampak pada tabel berikut ;

Tabel 12. Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Jayawijaya

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase Balita Gizi Buruk			0,20	0,12	0,18

Berdasarkan tabel diatas perentase anak Balita kasus gizi buruk di kabupaten Jayawijaya pada tahun 2016 sebesar 0,20 % turun menjadi 0,12 % pada tahun 2017, akan tetapi pada tahun 2018 meningkatnya menjadi 0,18 %.

#### 2.3.2. Indikator Kinerja Urusan Wajib

Indikator wajib kesehatan di implementasikan melalui program upaya kesehatan masyarakat yang berpodoman pada Keputusan Meteri Kesehatan RI, Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota serta Surat Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

Berikut di bawah ini pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan berdasarkan indikator SPM dan Realisasi anggaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya Kabupaten Jayawijaya tahun 2013-2018.

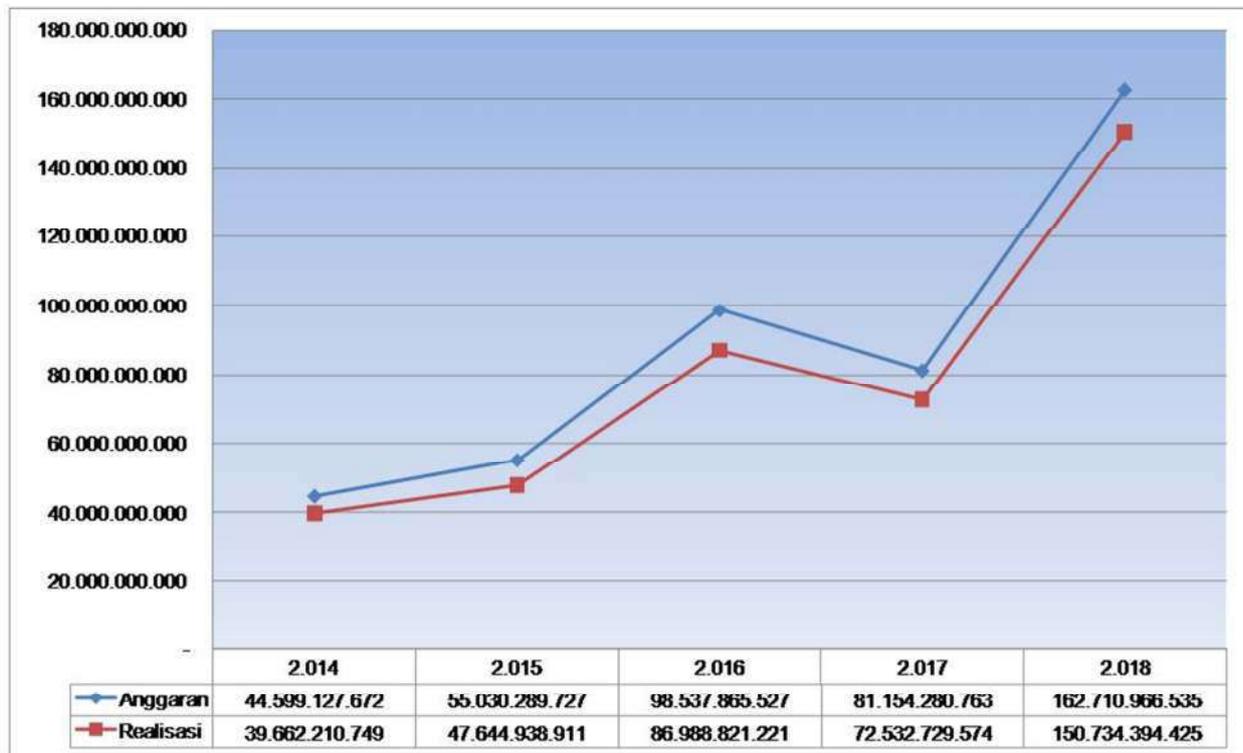
Tabel 13. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya  
Tahun 2013-2018

No	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA Dinkes Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun Ke				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
<b>I.</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Dasar</b>																		
1	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4				43	43	45	45	47	21,2	17,4	28	16,4	18,4	49,3	40,5	62,2	36,4	39,1
2	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani				70	70	73	75	80	22,5	4,6	80	93,5	87,7	32,1	6,6	109,6	124,7	109,6
3	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan				60	78	79	79	80	52	40,6	65	49	42,1	86,7	52	82,3	62	52,6
4	Cakupan Pelayanan Nifas				60	78	79	79	80	54,1	40,2	65,9	49,9	42	90,2	51,5	83,4	63,2	52,5
5	Cakupan Kunjungan Neonatus (KN)				60	78	79	79	80	53,9	16,1	67,8	58	42	89,8	20,6	85,8	73,4	52,5
6	Cakupan Neonatus dengan komplikasi ditangani				80	50	59	59		5,2	3,36	26,6	88,5		6,5	6,7	45,1	150	
7	Cakupan Kunjungan Bayi				50	37	41	41		31	45	32,9	136,5		62	121,6	80,2	332,9	
8	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)				100	100	100	100	100	0	0	0	2	6	0,0	0,0	0,0	2	6
9	Cakupan Pelayanan Anak Balita				60	45	51	51		24	46	53,4	68		40	102,2	104,7	133,3	

No	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA Dinkes Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun Ke				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
10	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan bagi keluarga miskin				50														
11	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan				100	100	100	100			100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat				50	20													
13	Cakupan peserta KB aktif																		
14	Acute Falacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun				4	4	4	4			2	4	5		0,0	50,0	100	125,0	
15	Penemuan Penderita Pneumonia Balita				10	10	10	10	10			2,6	2,96		0,0	0,0	26,0	29,6	0,0
16	Penemuan pasien baru TB BTA positif				445	445	998	960	918	125	185	585	527	525	28,1	41,6	58,6	54,9	57,2
17	Penderita DBD yang Ditangani				100	100	100	100	100	0	0	0	0	0,0					0,0
18	Penemuan Penderita Diare				10	10	10	10				1,6	1,1			16,0	11,0		
19	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin				80	80	80	80	80		59,7		28	28,7				35,0	39,0
<b>II.</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Rujukan</b>																		
19	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien				100	100	100	100	100										
20	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota																		

No	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA Dinkes Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun Ke				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
<b>III.</b>	<b>Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB</b>																		
21	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Epidemiologi < 24 Jam				100	100	100	100	100										
<b>IV</b>	<b>Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>																		
22	Cakupan Desa Siaga Aktif					25													

Tabel 14. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2018



Sumber data : Subbagian Keuangan

## 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

Dalam rangka upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di kabupaten Jayawijaya, permasalahan kesehatan sangat kompleks dan dibutuhkan penanganan yang komprehensif tidak hanya sektor kesehatan tetapi juga semua sektor dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Masalah internal dan eksternal adalah merupakan penyebab faktor rendahnya cakupan pelayanan kesehatan di masyarakat dan masih menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan dengan baik. Berikut ini tantangan dan peluang pelayanan kesehatan yang sangat perlu diselesaikan dalam rangka mendukung pembangunan kesehatan di Kabupaten Jayawijaya dalam lima tahun ke depan, yaitu sebagai berikut.

#### 2.4.1. Tantangan

- 1) Kondisi geografi di beberapa Distrik yang ada di Kabupaten Jayawijaya sangat sulit diakses sehingga dibutuhkan pendanaan yang sangat besar untuk menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
- 2) Masih rendahnya pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat tentang kesehatan
- 3) Persebaran pemukiman penduduk yang tidak terkonsentrasi sehingga membutuhkan strategi khusus dalam menyediakan fasilitas layanan kesehatan dan penempatan tenaga kesehatan
- 4) Angka kemiskinan relative tinggi dan pengangguran cukup tinggi
- 5) Pecandu minuman keras relative tinggi
- 6) Rendahnya jumlah tenaga di fasilitas pelayanan kesehatan (dokter umum, perawat, bidan, tenaga gizi dan lain-lain) belum sesuai dengan Permenkes Nomor 75 tahun 2014 serta distribusi SDM kesehatan di fasilitas layanan kesehatan belum merata
- 7) Peralatan kesehatan di Puskesmas masih terbatas terutama peralatan pada layanan Kesehatan Ibu dan Anak dan pada Upaya Kesehatan Masyarakat
- 8) Akses informasi yang rendah, penyebaran masih terbatas dan keterbukaan informasi kurang
- 9) Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pembangunan layanan kesehatan
- 10) Kondisi budaya dan bahasa masyarakat yang ada di Kabupaten Jayawijaya membutuhkan strategi khusus dalam perencanaan pembangunan kesehatan
- 11) Perencanaan pembangunan kesehatan yang kurang terintegrasi antara Pemerintah Pusat, Propinsi serta dengan perencanaan instansi-instansi terkait.
- 12) Belum kuatnya jejaring sistem rujukan pelayanan kesehatan
- 13) Belum optimalnya pelaksanaan surveillance penyakit dan kematian berbasis Rumah Sakit, Puskesmas dan masyarakat.

#### 2.4.2. Peluang

- 1) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara beserta turunannya Terbitnya UU No. 5 Tahun 2014 ini memberikan harapan dan peluang dalam penetapan pejabat di Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya. Dalam UU tersebut misalnya, penetapan pejabat akan dilakukan dengan sistem lelang jabatan. Selain itu, kewenangan bupati (kepala daerah kabupaten/kota) juga akan dibatasi.
- 2) Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Perpres No. 72 Tahun 2012 ini penting sebagai acuan untuk menata Sistem Kesehatan Daerah (SKD) termasuk SKD Kabupaten Jayawijaya. Dengan dukungan revisi UU No. 32 Tahun 2004 beserta turunannya, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya diharapkan mampu menjadi “panglima” dalam sistem kesehatan di wilayahnya. Dengan kata lain, tanggung jawab kewilayahan dari kesehatan Kabupaten Jayawijaya akan bisa dijalankan.
- 3) Kebijakan Pemerintah Pusat yang mendukung pemenuhan sarana dan prasarana layanan kesehatan melalui dana DAK
- 4) Adanya kebijakan ketersediaan dana 15% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD/OTSUS) untuk pelayanan kesehatan
- 5) Peraturan Gubernur tentang program Kartu Papua Sehat (KPS)
- 6) Tersedianya program Jaminan kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Persalinan Normal (Jampersal), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Program Pelayanan Kesehatan Miskin pada daerah sulit dijangkau.
- 7) Ada lembaga dunia yang mendukung program kesehatan

### 2.4.3. Analisis Capaian Sasaran Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi serta Dinas Kesehatan Kabupaten

Tabel 15. Berbandingan Capaian Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya terhadap Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Papua dan Sasaran Renstra Kementerian/Lembaga (K/L)

Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya	Sasaran Pada Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Papua	Sasaran Pada Renstra Kementerian Kesehatan RI
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)	Capaian cakupan kunjungan ibu hamil (K4) Kabupaten Jayawijaya tahun 2018, yaitu 18,4%	Capaian cakupan K4 Dinas Kesehatan Propinsi tahun 2018, yaitu	Capaian cakupan K4 Nasional tahun 2018, yaitu
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (Pn)	Capaian cakupan (Pn) Kabupaten Jayawijaya tahun 2018, yaitu 38,2% angka ini di bawah Target yang di tentukan yaitu 80%	Capaian cakupan (Pn) Dinas Kesehatan Propinsi tahun 2018, yaitu	Capaian cakupan (Pn) Kemenkes RI tahun 2017, yaitu 82,8%
Persentase Gizi Buruk	Capaian cakupan persentase gizi buruk pada Balita Kabupaten Jayawijaya tahun 2018	Capaian cakupan Gizi Buruk Balita Propinsi Papua tahun 2018, yaitu	Capaian cakupan Gizi Buruk Balita Nasional tahun 2018, yaitu
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Capaian cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kabupaten Jayawijaya tahun 2018, yaitu	Capaian cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Dinas Kesehatan Propinsi tahun 2018, yaitu	Capaian cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Nasional tahun 2018, yaitu
API Per 1.000 Penduduk	Capaian cakupan persentase API Kabupaten Jayawijaya tahun 2018, yaitu 4,2 per 1.000 penduduk	Capaian cakupan persentase API Propinsi Papua tahun 2018, yaitu per 1.000 penduduk	Capaian cakupan persentase API Nasional tahun 2018, yaitu 0,84 per 1.000 penduduk

# BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

---

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian yang terpenting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan-permasalahan pembangunan khususnya di bidang kesehatan dalam lima tahun kedepan.

### 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KESEHATAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya terdiri dari 4 Bidang dan 1 Sekertaris, yaitu 1. Bidang Kesehatan Masyarakat, 2. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 3. Bidang Pelayanan Kesehatan, dan 4. Bidang Sumber Daya Kesehatan, Berikut dibawah ini pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas sasaran pembangunan daerah urusan bidang kesehatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 yaitu ***Rendahnya Kualitas Pelayanan Kesehatan*** di Kabupaten Jayawijaya yang diidentifikasi permasalahannya berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas kesehatan, yaitu sebagai berikut ;

Tabel 16. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas  
Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan

<b>Malasalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
1 Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan	1 Kualitas pelayanan kesehatan belum memenuhi standar dan rendahnya akses pelayanan kesehatan	1 Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dasar maupun pelayanan rujukan yang memenuhi standar 2 Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM kesehatan 3 Distribusi tenaga medis tidak merata 4 Belum optimalnya sistem jaminan kesehatan masyarakat 5 Belum baiknya sistem rujukan berjenjang 6 Belum semua puskesmas teregistrasi dan terakreditasi 7 Rendahnya pelayanan kesehatan di daerah-daerah terbelakang dan terisolir 8 Belum baiknya sistem pencatatan dan pelaporan
	2 Rendahnya pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas	1 Rendahnya pelayanan antenatal 2 Rendahnya pelayanan persalinaan di fasilitas kesehatan 3 Rendahnya pelayanan kesehatan pada ibu nifas 4 Rendahnya pelayanan pada neonatus, bayi, dan Balita 5 Rendahnya status gizi masyarakat, terutama gizi buruk pada Balita, masih tingginya prevalensi anak kerdil, anak kurus dan sangat kurus (stunting) 6 Rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta rendahnya kemandirian masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan

Malasalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		7 Rendahnya kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja 8 Terbatasnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terbelakang dan terisolir 9 Belum baik sistem pencatatan dan pelaporan
	3 Masih tingginya angka kesakitan	1 Tingginya kasus penyakit menular dan mulai meningkatnya penyakit tidak menular 2 Rendahnya cakupan pelayanan imunisasi pada ibu, bayi, anak balita dan anak Sekolah 3 Belum optimalnya sistem survailans dan kewaspadaan dini kejadian luar biasa (KLB) 4 Belum optimalnya penanggulangan bencana krisis masalah kesehatan 5 Belum baiknya sistem pencatatan dan pelaporan
	4 Terbatasnya sumber daya kesehatan	1 Belum terpenuhinya standar ketenagaan, ketersediaan, distribusi dan kualitas di sarana pelayanan 2 Belum terpenuhinya alat kesehatan di sarana pelayanan 3 Terbatasnya tenaga kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil 4 Kurangnya koordinasi internal dalam perijinan dan regulasi tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan perijinan lainnya 5 Belum baiknya sistem pencatatan dan pelaporan
	5 Belum optimalnya manajemen sistem informasi kesehatan	1 Belum memadainya penerapan sistem manajemen informasi kesehatan

Malasalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<p>2 Sistem pengelolaan data dan informasi kesehatan baik dari tingkat puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya ke Dinas belum terlaksana dengan baik</p> <p>3 Sistem pengelolaan data belum dilaksanakan terpusat satu pintu</p> <p>4 Belum lengkapnya standar oprasional prosedur (SOP) pelayanan kesehatan</p>
	<p>6 Belum optimalnya tata kelola Pemerintahan</p>	<p>1 Rendahnya budaya kerja dan disiplin Aparatur</p> <p>2 Belum semua Aparatur memahami tugas, fungsi dan uraian tugasnya</p> <p>3 Rendahnya kapasitas Aparatur dibidang administrasi dan manajemen pemerintahan</p> <p>4 Masih ada tugas dan fungsi bidang yang tumpang tindih</p> <p>5 Belum dilakukannya analisis jabatan</p> <p>6 Penempatan pejabat belum sesuai dengan kompotensi dan kualifikasi</p> <p>7 Belum optimalnya fungsi, pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pengawasan dan evaluasi</p> <p>8 Kurang tegasnya pemberian sanksi terhadap Aparatur yang melanggar peraturan yang ada</p> <p>9 Belum optimalnya penyerapan anggaran baik APBN, APBD maupun sumber dana lain serta pemanfaatan dana dari dukungan dana dari donor agency atau program vertical</p>

Berdasarkan uraian tabel tersebut di atas, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan kesehatan, yaitu sebagai berikut ;

- 1) Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dasar maupun pelayanan rujukan yang memenuhi standar
- 2) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM kesehatan
- 3) Distribusi tenaga medis tidak merata
- 4) Belum optimalnya sistem jaminan kesehatan masyarakat
- 5) Belum baiknya sistem rujukan berjenjang
- 6) Rendahnya pelayanan kesehatan di daerah-daerah terbelakang dan terisolir
- 7) Rendahnya pelayanan antenatal
- 8) Rendahnya pelayanan persalihan di fasilitas kesehatan
- 9) Rendahnya pelayanan kesehatan pada ibu nifas
- 10) Rendahnya pelayanan pada neonatus, bayi, dan Balita
- 11) Rendahnya status gizi masyarakat, terutama gizi buruk pada Balita, masih tingginya prevalensi anak kerdil, anak kurus dan sangat kurus (stunting)
- 12) Rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta rendahnya kemandirian masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan
- 13) Rendahnya kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja
- 14) Terbatasnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terbelakang dan terisolir
- 15) Tingginya kasus penyakit menular dan mulai meningkatnya penyakit tidak menular
- 16) Rendahnya cakupan pelayanan imunisasi pada ibu, bayi dan anak balita
- 17) Belum optimalnya sistem survailans dan kewaspadaan dini kejadian luar biasa (KLB)
- 18) Belum optimalnya penanggulangan bencana krisis masalah kesehatan
- 19) Belum terpenuhinya standar ketenagaan, ketersediaan, distribusi dan kualitas di sarana pelayanan
- 20) Belum terpenuhinya alat kesehatan di sarana pelayanan
- 21) Terbatasnya tenaga kesehatan di daerah terkebelakang dan terisolir
- 22) Kurangnya koordinasi internal dalam perijinan dan regulasi tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan perijinan lainnya
- 23) Belum memadainya penerapan sistem manajemen informasi kesehatan

- 24) Sistem pengelolaan data dan informasi kesehatan baik dari tingkat puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya ke Dinas belum terlaksana dengan baik
- 25) Belum semua puskesmas teregistrasi dan terakreditasi
- 26) Sistem pengelolaan data belum dilaksanakan terpusat satu pintu
- 27) Belum lengkapnya standar operasional prosedur (SOP) pelayanan kesehatan
- 28) Rendahnya budaya kerja dan disiplin Aparatur baik di Diinas Kesehatan maupun di Puskesmas
- 29) Belum semua Aparatur memahami tugas, fungsi dan uraian tugasnya
- 30) Rendahnya kapasitas Aparatur dibidang administrasi dan manajemen pemerintahan
- 31) Penempatan pejabat belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi
- 32) Masih ada tugas dan fungsi bidang yang tumpang tindih
- 33) Belum dilakukannya analisis jabatan
- 34) Belum optimalnya fungsi, pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pengawasan dan evaluasi
- 35) Kurang tegasnya pemberian sanksi terhadap Aparatur yang melanggar peraturan yang ada
- 36) Belum optimalnya penyerapan anggaran baik APBN, APBD maupun sumber dana lain serta pemanfaatan dana dari dukungan dana dari donor agency atau program vertical.

### **3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

#### **3.2.1. Visi**

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023 adalah sebagai berikut ;

***“ Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera, Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya “***

Pernyataan Visi Bupati dan Wakil Bupati tersebut diatas mengandung 4 (empat) makna, yaitu sebagai berikut ;

- 1) Sejahtera, dimaksudkan suatu kondisi dimana tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dalam suasana kehidupan yang aman, tenteram, damai dan bahagia
- 2) Mandiri, secara ekonomi dimaksudkan bahwa rakyat Kabupaten Jayawijaya mampu bertumbuh dan berkembang di atas potensi dirinya dan lingkungannya sebagai rahmat Tuhan yang harus dimanfaatkan dengan bijaksana, dipelihara dan dijaga kelestariannya, untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing.
- 3) Berkualitas, dimaksudkan bahwa masyarakat Jayawijaya memiliki keunggulan kompotitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu teknologi, mampu menciptakan keseimbangan anatara kecerdasan intelegensia (intelligentsia question), emosional (emotional question) dan spiritual (spiritual question) serta sehat jasmani dan rohani dan mampu daya saing.
- 4) Berbudaya, dimaksudkan bahwa rakyat Jayawijaya senantiasa akan tumbuh dalam norma-norma kehidupan yang lebih baik.

### 3.2.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dalam upaya untuk mencapai Visi pembangunan diatas, maka ada 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Jayawijaya periode 2018-2023, yaitu sebagai berikut ;

- 1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik
- 2) Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM
- 3) Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan
- 4) Meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis, damai dan utuh dengan memperhatikan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP)
- 5) Meningkatkan infrastruktur dasar untuk mendorong sektor jasa dan pariwisata yang berkelanjutan dan memadai

### 3.2.3. Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya, sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Dengan sifat program pembangunan daerah yang strategis, maka pelaksanaan dan penganggarannya diutamakan. Program pembangunan daerah merupakan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati untuk mencapai visi dan misi RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023. Program unggulan tersebut adalah :

- 1) Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Jayawijaya
- 2) Pemberdayaan ekonomi rakyat
- 3) Peningkatan infrastruktur daerah Kabupaten Jayawijaya
- 4) Penyelamatan lingkungan dan sumber daya alam Kabupaten Jayawijaya
- 5) Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya
- 6) Pembinaan dan penyediaan sarana dan prasarana seni dan olahraga bagi pemuda
- 7) Pembinaan perempuan, ibu dan anak
- 8) Penataan ruang, wilayah dan kawasan
- 9) Pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan di Kabupaten Jayawijaya
- 10) Penerapan teknologi informasi dan komunikasi
- 11) Peningkatan ketahanan pangan dan kebutuhan pokok masyarakat
- 12) Pembinaan pemerintahan distrik dan kampung
- 13) Pemberdayaan kelembagaan agamat, adat dan kemasyarakatan
- 14) Peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara
- 15) Pengembangan pengolahan dan pemasaran produksi masyarakat

Berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala terpilih, maka Dinas Kesehatan akan menindaklanjuti melalui misi ke 2, yaitu Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia. Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Dinas Kesehatan merumuskan Visi dan Misi

Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023., yaitu sebagai berikut ;

Tabel 17. Perumusan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023

Masalah Utama	Pernyataan Visi	Masalah Pokok	Misi
Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan	Jayawijaya Sejahtera	Rendahnya produktivitas dan daya saing ekonomi	Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan
	Jayawijaya Mandiri		Meningkatkan infrastruktur dasar untuk mendorong sektor jasa dan pariwisata yang berkelanjutan dan memadai
	<b>Jayawijaya Berkualitas</b>	<b>Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia</b>	<b>Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM</b>
	Jayawijaya Berbudaya		Meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis, damai dan utuh dengan memperhatikan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi dan program prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan, yaitu sebagai berikut ;

Tabel 18. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi II : Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM	<p>1 Kualitas pelayanan kesehatan belum memenuhi standar dan rendahnya akses pelayanan kesehatan</p> <p>2 Rendahnya pelayanan kesehatan ibu dan anak</p> <p>3 Masih tingginya angka kesakitan</p> <p>4 Terbatasnya sumber daya kesehatan</p> <p>5 Belum optimalnya manajemen informasi dan mutu pelayanan kesehatan</p> <p>6 Belum optimalnya tata kelola Pemerintahan</p>	<p>1 Distribusi penduduk yang tidak merata</p> <p>2 Kondisi geografi di beberapa distrik yang sulit</p> <p>3 Budaya/prilaku yang tidak mendukung pola hidup sehat</p> <p>4 Pengetahuan masyarakat tentang hidup sehat relative rendah</p> <p>5 Ekonomi masyarakat relative rendah</p> <p>6 Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang belum memenuhi standar</p> <p>7 Terbatasnya jangkauan petugas Puskesmas</p> <p>8 Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata</p> <p>9 Terbatasnya kemampuan tenaga kesehatan</p> <p>10 Belum optimalnya tata kelola pemerintahan</p>	<p>1 Pendanaan 15% untuk kesehatan sesuai UU OTSUS</p> <p>2 Komitmen yang tinggi dari Pemerintah Pusat untuk membangun Papua</p> <p>3 Adanya dukungan kemitraan dengan lembaga donor</p> <p>4 Kepemimpinan yang kuat dan semangat perubahan</p> <p>5 Adanya peraturan dan Perundang-Undangan yang mendukung pelayan kesehatan</p>

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor		
			Penghambat	Pendorong	
			11	Belum terjaminnya keamanan petugas kesehatan di pusat layanan kesehatan	

### 3.3. TELAAHAN RENCANA STRATEGI KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Guna mewujudkan visi pembangunan Nasional pada periode 2014-2019 yaitu menjadi Indonesia berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian Kesehatan menjabarkan visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis untuk mendukung perwujudan visi pembangunan Nasional. Adapun Visi Kementerian Kesehatan RI pada periode tahun 2015-2019 adalah “ Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong “

Berdasarkan arahan dan kebijakan serta memperhatikan peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan kesehatan, maka misi yang akan dicapai oleh Kementerian Kesehatan RI dalam periode lima tahun ke depan ;

- 1) Terwujudnya keamanan Nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, monopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritime dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan Negara hukum
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai Negara maritime
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi maju dan sejahtera
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing

- 6) Menwujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Berdasarkan visi dan misi tersebut diatas, kemudian dirumuskan 9 agenda Nawacita, yaitu sebagai berikut ;

- 1) Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara, dengan sub agenda ;
  - a. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif
  - b. Penguatan sistem pertahanan
  - c. Memperkuat jatidiri sebagai Negara maritime
  - d. Meningkatkan kualitas perlindungan warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri
  - e. Melindungi hak dan keselamatan pekerja imigran
  - f. Memperkuat peran dalam kerjasama global dan regional
  - g. Meminimalisasi dampak globalisasi
  - h. Membangun industry pertahanan nasional
  - i. Membangun Polri yang professional
  - j. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data serta informasi kependudukan.
- 2) Membangun tata kelolah Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan sub agenda ;
  - a. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan public
  - b. Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan
  - c. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
  - d. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional (RBN)
  - e. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam rangka Negara kesatuan, dengan sub agenda ;
  - a. Peletakan dasar-dasar dimulinya desentralisasi asimetris
  - b. Pemerataan pembangunan antar wilayah terutama kawasan timur Indonesia
  - c. Penanggulangan kemiskinan

- 4) Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, dengan sub agenda ;
  - a. Peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan
  - b. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
  - c. Pemberantasan penyalahgunaan narkoba
  - d. Menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah
  - e. Melindungi anak, perempuan, dan kelompokan marjinal
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, dengan sub agenda ;
  - a. Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana
  - b. Pembangunan pendidikan khususnya pelaksanaan program Indonesia pintar
  - c. Pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan program Indonesia Sehat
  - d. Peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan program Indonesia Kerja
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional, dengan sub agenda ;
  - a. Membangun konektivitas Nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan
  - b. Membangun transportasi missal perkotaan
  - c. Membangun insfraktur/prasarana dasar
  - d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur
  - e. Memperkuat peran investasi
  - f. Mendorong BUMN menjadi agen pembangunan
  - g. Meningkatkan kapasitas inovasi dan teknologi
  - h. Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional
  - i. Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka tujuan Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 adalah meningkatnya status kesehatan masyarakat dengan indikator sasaran yang akan dicapai sebagai berikut ;

## 1) Indikator Sasaran Kementerian Kesehatan

Tabel 19. Sasaran Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019

No	Indikator	Target 2019
I	Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat	
1	Angka Kematian Ibu 100.000 Kelahiran Hidup	306
2	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	24
3	Prevalensi Kekurangan Gizi (underweigh) pada Balita (persen)	17,0
4	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek (bawah 2 tahun (persen)	28,0
II	Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular Tidak Menular	
1	Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	245
2	Prevalensi HIV (persen)	< 0,50
3	Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi Malaria	300
4	Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	23,4
5	Prevalensi Obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)	15,4
6	Prevalensi merokok penduduk usia < 18 tahun (persen)	5,4
III	Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan	M34LWV
1	Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	5.600
2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD tersertifikasi akreditasi nasional	481
3	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	95
IV	Meningkatnya Perlindungan Finansial, Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat serta Sumberdaya Kesehatan	
1	Persentase Kepesertaan (SJSN) kesehatan (persen)	Min 95
2	Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki lima jenis ketenagaan	5.600
3	Persentase RSUD Kabupaten/Kota Kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis	60
4	Persentase Ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	90
5	Persentase obat yang memenuhi syarat	94

## 2) Strategi Kementerian Kesehatan

Strategi pembangunan kesehatan tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut ;

- a. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia yang berkualitas
- b. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat
- c. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
- d. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas
- e. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas farmasi dan alat kesehatan
- f. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan, meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumberdaya manusia kesehatan
- g. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- h. Menguatkan manajemen, penelitian pengembangan dan sistem informasi
- i. Memantapkan pelaksanaan sisten jaminan sosial nasional bidang kesehatan
- j. Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan

### **3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)**

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Jayawijaya yang berkelanjutan, ditetapkan arahan penataan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. Dimana ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup lain untuk melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sitem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional. Sedang pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis

beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

Letak geografis Kabupaten Jayawijaya berdasarkan tinjauan Astronomi maka Kabupaten Jayawijaya terletak pada  $139^{\circ}30' - 139^{\circ}40'$  BT dan  $3^{\circ}45' \text{LU} - 4^{\circ}20' \text{LS}$  (penentuan didasarkan titik koordinat pada peta land cover Papua dengan skala 1 : 250.000 tahun 2002). Dengan luas wilayah yang tersisa sebesar  $13.925 \text{ km}^2$ , terdiri dari 40 distrik, 4 Kelurahan dan 328 kampung atau Desa, yang beribukota di Wamena terletak dengan batas batas wilayah sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara : Kabupaten Memberamo Tengah, dan Kabupaten Tolikara.
- ❖ Sebelah Timur : Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Yahukimo.
- ❖ Sebelah Selatan : Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Nduga.
- ❖ Sebelah Barat : Kabupaten Nduga, Kabupaten Lanny Jaya.

Penataan ruang Kabupaten Jayawijaya bertujuan untuk mengembangkan wilayah yang aman, nyaman, produktif, progresif, berdaya saing dan berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian. Pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten Jayawijaya, strategi penataan ruang wilayah kedepan, yaitu meliputi ;

- 1) Pengembangan pariwisata dan pertanian sebagai sektor dan subsektor ekonomi unggulan, serta pengembangan perikanan dan kehutanan sebagai sektor ekonom pendukung
- 2) Pengembangan prasarana serta sarana pendukung pariwisata dan pertanian
- 3) Pengembangan manajemen resiko bencana
- 4) Pemantapan peran wamena sebagai pusat kegiatan wilayah dan pusat-pusat kegiatan lainnya sesuai dengan struktur hirarkinya
- 5) Peningkatan kualitas jaringan prasarana transportasi darat dan udara
- 6) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, energy, dan sumber daya air
- 7) Pengendalian fungsi kawasan lindung
- 8) Pengembangan dan peningkatan kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan

- 9) Pengembangan kawasan yang diprioritaskan untuk mendukung sektor ekonomi potensial, pengembangan sosial budaya, dan daya dukung lingkungan hidup.
- 10) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Dengan ditetapkannya RTRW 2033 Kabupaten Jayawijaya, banyak hal yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan sebagai pengembang tugas pelayanan kesehatan dan peningkatan taraf derajat kesehatan masyarakat.

Layanan kesehatan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya memperhatikan peningkatan fungsi kawasan, utamanya pada pemukiman penduduk dimana layanan kesehatan tersebut sangat dibutuhkan. Dalam rangka pengembangan layanan kesehatan yang berkualitas, yang perlu dipertimbangkan beberapa faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, yaitu sebagai berikut ;

- 1) Kondisi lingkungan, baik fisik maupun sosial
- 2) Prilaku masyarakat, meliputi kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, pendidikan, sosial ekonomi, dan lain-lain
- 3) Pelayanan kesehatan, meliputi ketersediaan dan kualitas
- 4) Keturunan, meliputi faktor yang sudah ada pada individu-individu di masyarakat yang dibawa sejak lahir dan menurun.

Berdasarkan pada peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka telaahan terkait permasalahan pelayanan kesehatan di Kabupaten Jayawijaya beserta faktor penghambat dan faktor pendorong dapat dilihat dalam tabel berikut ;

Tabel 20. Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Tata Ruang Wilayah dan KLHS Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS dan RTRW dengan Tupoksi	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan	Belum terpenuhi ketersediaan sarana dan parasarana pelayanan kesehatan di setiap Distrik	Lahan untuk pembangunan layanan kesehatan yang terbatas  Kepemilikan tanah sering menjadi kendala	Adanya dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat
2	Peningkatan sarana air bersih dan jamban	Belum terpenuhinya ketersediaan sarana air bersih di rumah tangga  Masih banyak masyarakat yang buang air besar sembarang	Sulitnya mendapatkan sumber air bersih  Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat	Adanya dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat
3	Pemantauan dan pengamatan terhadap perkembangan penyakit berbasis lingkungan yang berkaitan dengan pemukiman penduduk, iklim/cuaca	Masih tingginya kasus penyakit yang berbasis lingkungan yang berkaitan dengan iklim/cuaca, yaitu Ispa, Diare, Pneumonia dan lain-lain	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat	Komitmen yang tinggi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan

Dengan adanya telaahan berdasarkan pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) maka perlu mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Jayawijaya dalam pengembangan pelayanan kesehatan selanjutnya agar dapat berdaya guna, berhasilguna, dan berkelanjutan demi terciptanya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Jayawijaya yang optimal.

### 3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah sesuatu kondisi atau hal yang diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, mengingat dampaknya yang sangat signifikan bagi masyarakat di masa depan. Isu strategis apabila tidak

diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang sangat besar> Demikian pula sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan diperkiraan dapat mempengaruhi agenda pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

### 3.5.1. Isu Strategis International (Sustainable Development Goals/SDGs)

Seiring dengan berakhirnya MDGs pada tahun 2015, diskusi mengenai kerangka kerja pembangunan International pasca 2015 dimulai. Pada pertemuan Rio +20 Summit 192 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memulai proses perancangan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs (Sustainable Development Goals) yang berorientasi pada aksi, ringkas dan mudah dikomunikasikan, jumlah terbatas, aspiratif, bersifat global secara alamiah dan dapat diterapkan pada semua Negara dengan memperhatikan perbedaan kenyataan, kapasitas dan tingkat pembangunan sebuah Negara dan menghargai kebijakan dan prioritas Nasional. Setelah lebih dari satu tahun perundingan konsultatif yang inklusif dan insentif, kelompok kerja terbuka majelis umum untuk tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) mengajukan 17 tujuan spesifik, 62 sasaran dengan 169 target yang saling berkaitan.

Negera-Negara anggota PBB telah menyepakati bahwa agenda yang disusun oleh kelompok kerja terbuka akan menjadi basis utama untuk proses antar pemerintah pasca 2015. Untuk sector kesehatan yang menjadi isu strategis adalah pada poin no. 3, yaitu **Memastikan Hidup yang Sehat dan Memajukan Kesejahteraan Bagi Semua Orang di Semua Usia**. Melalui isu ini, Indonesia menetapkan prioritas target SDGs melalui tim pembangunan berkelanjutan (TPB) dengan 17 Goal, 169 target dan 240 indikator. Untuk sector kesehatan berada pada pilar pembangunan sosial, yaitu dengan 4 goal, 19 target, dan 31 indikator. 4 goal yang dimaksud, antara lain adalah ;

- 1) Gizi masyarakat dengan 8 target
- 2) Sistem kesehatan nasional dengan 13 target

- 3) Akses kesehatan reproduksi dan KB dengan 9 target
- 4) Sanitasi dan air bersih dengan 8 target

Beberapa indikator dan target yang perlu diperhatikan dalam menunjang pencapaian SDGs di Indonesia sampai dengan tahun 2030 adalah ;

- 1) Tahun 2025 menurunkan angka stunting dan wasting pada Balita
- 2) Mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) hingga dibawah 70 per 100.000 KH
- 3) Mengakhiri kematian bayi dan Balita yang dapat dicegah, dengan menurunkan angka kematian nasional hingga 12 per 1.000 KH dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 KH
- 4) Mengakhiri epidemic AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan penyakit tropis yang terabaikan, serta memerangi hepatitis, penyakit bersumber air dan menular lainnya
- 5) Mengurangi 1/3 kematian premature akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan perawatan, serta mendorong kesehatan dan kesejahteraan mental
- 6) Mmperkuat pencegahan dan perawatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan alcohol yang membahayakan
- 7) Mengerangi setengah jumlah global kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas
- 8) Menjamin akses semesta kepada pekayanan kesehatan seksual dan reproduksi
- 9) Mencapai Universal Health Coverage, termasuk perlindungan resiko keuangan, akses kepada pelayanan kesehatan dasar berkualitas dan akses kepada obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, dan berkualitas bagi semua orang
- 10) Mengurangi secara subtansial kematian dan kesakitan akibat senyawa berbahaya serta kontaminasi dan polusi udara, air dan tanah

### 3.5.2. Isu atau Kebijakan Nasional

Selain memperhatikan isu skal International dan regional hal-hal lain yang menjadi pertimbangan adalah isu strategis Nasional yang dalam

hal ini telah dituangkan dalam Peraturan Presedin Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019, yaitu menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, yang dirumuskan dalam sembilan agenda prioritas yang disebut “ **NAWA CITA** “, yaitu ;

- 1) Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara
- 2) Membangun tata kelolah Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam rangka Negara kesatuan
- 4) Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
- 5) *Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia***
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestic
- 8) Melakukan revolusi karakteristik bangsa
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Nawa Cita tersebut merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam visi, misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN tahun 2015-2019, yang terdiri dari empat bagian utama, yaitu ; (1) norma pembangunan ; (2) tiga dimensi pembangunan ; (3) kondisi yang diperlukan agar pembangunan dapat berlangsung ; serta (4) program-program percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah (quick wins). Selain itu ada beberapa hal yang akan dikuatkan melalui program Indonesia Sehat untuk pencapaian agenda prioritas ke 5 (lima) Nawa Cita, yaitu ;

- 1) Revitalisasi promosi kesehatan baik di Puskesmas dan Rumah Sakit
- 2) Program Nusantara Sehat sebagai bentuk hadirnya Negara di masyarakat
- 3) Program eliminasi campak
- 4) Program keluarga sehat

### 3.5.3. Isu Pembangunan Propinsi Papua

Sesuai dengan RPJMD Propinsi Papua tahun 2018-2023, isu strategis utama Propinsi Papua, meliputi ;

- 1) ***Peningkatan kualitas sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan dan gizi, baik dari status golongan pendapatan, gender maupun antar wilayah***
- 2) Pemantapan rasa aman dan suasana demokratis yang kondusif sebagai landasan utama pembangunan
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan dalam peningkatan pelayanan publik
- 4) Pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan berbasis komoditas dan karakteristik lokal didukung oleh pembangunan infrastruktur yang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan
- 5) Pengurangan kesenjangan, peningkatan pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah dan Kabupaten serta peningkatan kualitas ekosistem dan jasa lingkungan

### 3.5.4. Isu Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya

Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Jayawijaya 2018-2023 dapat diidentifikasi sebagai berikut ;

- 1) Pengembangan tatakelola pemerintahan yang memandang nilai strategis prinsip Akuntabilitas, Partisipasi, dan Transparansi;
- 2) Mempertahankan kondisi aman dan harmonis diantara kelompok masyarakat;
- 3) Mempertahankan pelestarian budaya lokal, nilai adat sebagai sebuah jati diri;
- 4) Pemerataan kebutuhan infrastruktur dasar dan penunjang;

- 5) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang berkeadilan, dalam mengurangi ketimpangan antar distrik;
- 6) Akselerasi pembangunan manusia yang bertumpu pada, akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi berbasis komoditas unggulan;
- 7) Pengembangan Kerjasama antar kabupaten di Wilayah Adat La Pago;

Dari uraian isu-isu strategis tersebut diatas maka dapat jelaskan bahawa isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat dimasa datang.

Peremusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Renstra Kementerian K/L dan Renstra Dinas Kabupaten sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat kepada Kepala Daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut ;

#### 3.5.1. Bidang Pelayanan Kesehatan

- a) Belum maksimalnya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit
- b) Belum seluruh sarana pelayanan kesehatan memiliki standar pelayanan kesehatan

- c) Belum maksimalnya sistem rujukan berjenjang dari Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit
- d) Belum semua sarana kesehatan terregistrasi dan terakreditasi

#### 3.5.2. Bidang Sumber Daya Kesehatan

- a) Pelayanan Registrasi dan izin tenaga kesehatan belum maksimal
- b) Kurangnya perlindungan keamanan kepada tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan
- c) Kurang meratanya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan di sarana kesehatan
- d) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan
- e) Masih tingginya penggunaan obat tidak rasional di sarana pelayanan kesehatan

#### 3.5.3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- a) Belum optimalnya sistem surveilans dan kewaspadaan dini kejadian luar biasa (KLB)
- b) Penyebab kematian di Kabupaten Jayawijaya disebabkan oleh penyakit menular
- c) Masih rendahnya pelayanan imunisasi pada ibu, bayi, anak balita dan anak Sekolah
- d) Meningkatnya penyakit tidak menular (PTM)
- e) Kondisi lingkungan masyarakat belum memenuhi standar kesetahan

#### 3.5.4. Bidang Kesehatan Masyarakat

- a) Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat pada ibu dan anak dan keluarga
- b) Belum optimalnya sistem data-informasi kesehatan
- c) Belum optimalnya pelayanan di posyandu
- d) Belum optimalnya promosi kesehatan terkait perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
- e) Kematian Ibu, angka kematian bayi dan gizi buruk
- f) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan upaya kesehatan berbasis masyarakat
- g) Belum konsistensinya pencatatan dan pelaporan kesehatan

### 3.5.5. Sekertariat

- a) Belum optimalnya fungsi, pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pengawasan dan evaluasi
- b) Kurang tegasnya pemberian sanksi terhadap Aparatur yang melanggar peraturan yang ada
- c) Rendahnya budaya kerja dan disiplin Aparatur
- d) Belum semua Aparatur memahami tugas, fungsi dan uraian tugasnya
- e) Masih ada tugas dan fungsi bidang yang tumpang tindih
- f) Belum dilakukannya analisis jabatan

# BAB IV

## TUJUAN DAN SASARAN

---

### 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai, tugas dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya merupakan penjabaran dari sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang menjadi urusan kesehatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 sebagaimana dalam tabel berikut ini ;

Tabel 21. Indikator Sasaran Urusan Kesehatan RPJMD Tahun 2018-2023

No	Indikator Sasaran	Capaian Kondisi Awal RPJMD 2018	Satuan	Target Kinerja pada Tahun Ke					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Angka Harapan Hidup (AHH)		Tahun	58,75 THN	58.83 THN	58.91 THN	58.99 THN	59.07 THN	59.07 THN
2	Angka Kematian Ibu Melahirkan per 1000 Kelahiran Hidup		1000 KH	3.79/1000 KH	3.75/1000 KH	3.71/1000 KH	3.67/1000 KH	3.63/1000 KH	3.63/1000 KH
3	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran		1000 KH	4.3/1000 KH	4.1/1000 KH	3.5/1000 KH	3.2/1000 KH	3/1000 KH	3/1000 KH

Tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten jayawijaya tahun 2018-2023 dilakukan melalui Misi I, yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, dan Misi 2, yaitu Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM, dengan sasaran sebagai berikut ;

- 1) Meningkatnya kualitas kesehatan, akses pelayanan kesehatan dan rujukan, dengan indikator yang ingin dicapai adalah ;
  - ❖ Jumlah kematian ibu melahirkan
  - ❖ Jumlah kematian bayi
  - ❖ Persentase Distrik yang memiliki 1 Puskesmas yang dibangun
  - ❖ Persentase puskesmas yang teregistrasi dan terakreditasi
  - ❖ Persentase kepuasan masyarakat
  - ❖ Persentase Elemen Penilaian Akreditasi Rumah Sakit yang Memenuhi Stanadar
  - ❖ Persentase Bed Occupancy Rate (BOR)
  - ❖ Jumlah hari lama rawat inap (Average Length of Stay)
  - ❖ Persentase Indikator Pelayanan Minimal (SPM) yang Mencapai Target
- 2) Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas, dengan indikator yang ingin dicapai adalah ;
  - ❖ Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil (K-4)
  - ❖ Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (Pf)
  - ❖ Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

- ❖ Persentase anak usia 0-59 bulan mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan standar
  - ❖ Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
  - ❖ Persentase warga Negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
  - ❖ Persentase anak balita gizi buruk
  - ❖ Persentase anak balita stunting
  - ❖ Cakupan (%) masyarakat akses terhadap air bersih
  - ❖ Cakupan (%) keluarga akses terhadap sanitasi
  - ❖ Cakupan (%) PHBS
- 3) Menurunnya angka kesakitan, dengan indikator yang ingin dicapai adalah ;
- ❖ Persentase warga Negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
  - ❖ Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
  - ❖ Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
  - ❖ Persentase ODJG berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
  - ❖ Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
  - ❖ Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar
  - ❖ Pencapaian API (Annual Parasite Incident)
- 4) Meningkatnya sumber daya kesehatan, dengan indikator yang ingin dicapai adalah ;
- ❖ Persentase puskesmas yang memenuhi standar ketenagaan minimal 5 jenis tenaga (perawat, bidan, kesling, gizi dan analis kesehatan)
  - ❖ Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
  - ❖ Persentase Kabupaten/Kota dengan ketersediaan obat, vaksin dan bahan medis habis pakai (BMHP)
- 5) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan indikator sasaran yang ingin dicapai adalah ;
- ❖ Persentase laporan akuntabilitas instansi pemerintah SAKIP

- 6) Meningkatnya kinerja organisasi kesehatan yang efektif, efisien, dan transparan, dengan yang ingin dicapai adalah ;
- ❖ Persentase kinerja organisasi kesehatan yang efektif, efisien, dan transparan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indicator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini

Tabel 22. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja Awal 2018	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	Mengoptimalkan pelayanan Kesehatan	Meningkatnya kinerja organisasi kesehatan yang efektif, efisien, dan transparan	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil hasil Pemeriksaan BPK pada Dinas Dinas Kesehatan	85	persen	90	95	100	100	100
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	1	dokumen	84	85	86	87	88
			Tingkat Kepuasan Internal Pegawai Dinas Kesehatan terhadap Layanan Kesekretariatan (Skala 10)			skala			3	5
2	Terwujudnya kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya kualitas kesehatan, akses pelayanan kesehatan dan rujukan	Jumlah kematian ibu melahirkan		KH	3.79	3.75	3.71	3.67	3.63
			Jumlah kematian bayi		KH	4.3	4.1	3.5	3.2	3
			Persentase Distrik yang memiliki 1 Puskesmas yang dibangun	60	Persen	65	65,4	73,1	80,8	88,5
			Persentase puskesmas yang teregistrasi dan terakreditasi	30,8	Persen	46,2	61,5	76,9	92,3	100
			Persentase kepuasan masyarakat (IKM)	75	Persen	76,6	77	78	79	80

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja Awal 2018	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
						2019	2020	2021	2022	2023
			Persentase Elemen Penilaian Akreditasi Rumah Sakit yang Memenuhi Stanadar	80	Persen	80	80	80	80	80
			Persentase Bed Occupancy Rate (BOR)	76	Persen	62	65	72	75	79
			Jumlah hari lama rawat inap (Average Length of Stay)	6,2	Hari	5,7	6,5	6,8	7,1	7,3
			Persentase Indikator Pelayanan Minimal (SPM) yang Mencapai Target		Persen				0,5	0,6
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang berkualitas	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil (K-4)	18,4	Persen	100	100	100	100	100
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (Pf)	36,8	Persen	100	100	100	100	100
			Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	42,2	Persen	100	100	100	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja Awal 2018	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
						2019	2020	2021	2022	2023
			Persentase anak usia 0-59 bulan mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan standar	38	Persen	100	100	100	100	100
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	18,78	Persen	100	100	100	100	100
			Persentase warga Negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	28,7	Persen	100	100	100	100	100
			Persentase anak balita gizi buruk	0,18	Persen	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
			Persentase anak balita stunting	26,9	Persen	26,3	25,6	24,9	24,3	23,6
			Cakupan (%) masyarakat akses terhadap air bersih	11	Persen	11	20	30	40	50
			Cakupan (%) keluarga akses terhadap sanitasi		Persen	18	20,5	24,5	28,5	32,5
			Cakupan (%) PHBS	20	Persen	25	27,5	30	32,5	35
		Menurunnya Angka Kesakitan	Persentase warga Negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		Persen	100	100	100	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja Awal 2018	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
						2019	2020	2021	2022	2023
			Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	0,51	Persen	100	100	100	100	100
			Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0,11	Persen	100	100	100	100	100
			Persentase ODJG berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		Persen	100	100	100	100	100
			Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	32	Persen	100	100	100	100	100
			Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	60	Persen	100	100	100	100	100
			Pencapaian API (Annual Parasite Incident)	2	Persen	1	<1	<1	<1	<1

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja Awal 2018	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
						2019	2020	2021	2022	2023
		Meningkatnya sumber daya kesehatan	Persentase puskesmas yang memenuhi standar ketenagaan minimal 5 jenis tenaga (perawat, bidan, kesling, gizi dan analis kesehatan)	50	Persen	57,6	65,4	73,1	80,8	88,5
			Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		persen	54,4	57,1	59,8	62,6	65,3
			Persentase Kabupaten/Kota dengan ketersediaan obat, vaksin dan bahan medis habis pakai (BMHP)		Persen	83	85	90	92	94

# BAB V

## STRATEGI DAN KEBIJAKAN

---

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 dibidang/urusan kesehatan yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, maka arah strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 dengan memperhatikan permasalahan kesehatan yang telah diidentifikasi melalui hasil review pelaksanaan pembangunan kesehatan sebelumnya. Berikut ini adalah strategis dan arah kebijakan yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tahun 2018-2023.

### 5.1. STRATEGI DINAS KESEHATAN

- 1) Penyempurnaan perencanaan
- 2) Penyempurnaan sistem manajemen informasi kesehatan
- 3) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan rujukan yang berkualitas
- 4) Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan anak balita serta peningkatan dan pemenuhan gizi masyarakat
- 5) Pencegahan penyakit menular, tidak menular dan penyakit endemik khususnya di daerah terpencil
- 6) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan secara merata disemua puskesmas dan jaringannya, dengan prioritas pada peningkatan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran sumberdaya manusia kesehatan
- 7) Menjamin ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan farmasi di puskesmas dan jaringannya

## 5.2. KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN

- 1) Penerapan sistem perencanaan berbasis data
- 2) Penerapan sistem manajemen mutu di jajaran kesehatan
- 3) Setiap distrik memiliki minimal 1 Puskesmas yang teregistrasi dan tersertifikasi akreditasi
- 4) Mewujudkan penerapan sistem manajemen kinerja Rumah sesuai dengan standar
- 5) Pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit Rujukan
- 6) Pelayanan antenatal care (ANC), persalinan di fasyankes oleh tenaga kesehatan, pelayanan nifas, pelayanan neonatus, bayi dan anak
- 7) Penguatan kapasitas SDM dalam melaksanakan supervisi fasilitatif dan pelacakan kasus gizi buruk dan stunting
- 8) Meningkatkan pola hidup bersih dan sehat dan mengaktifkan peran serta masyarakat melalui Posyandu
- 9) Meningkatkan akses air bersih dan sanitasi bagi kampung yang bermasalah air bersih dan sanitas
- 10) Pengendalian penyakit menular AIDS, TB dan Malaria
- 11) Pencegahan dan pengendalian penyakit Diare, Pneumonia, Ispa dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
- 12) Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
- 13) Pemberantasan dan pengendalian penyakit menular endemik, kusta, kaki gajah dan frambusia
- 14) Meningkatkan distribusi tenaga dan penangkatan tenaga lokal/setempat
- 15) Meningkatkan kualitas petugas melalui pelatihan
- 16) Penerapan mekanisme registrasi dan lisensi tenaga dengan uji kompetensi tenaga kesehatan
- 17) Mengembangkan insentif dan penyediaan fasilitas bagi petugas
- 18) Pengadaan obat-obatan dan buffer stock, pengelolaan obat sesuai standard an distribusi/pengiriman obat-obatan bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang mengalami kekurangan
- 19) Membangun sistem informasi dan jaringan informasi terintegrasi di bidang

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD Dinas Kesehatan dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan

perumusan strategi dan kebijakan pelayanan jangka menengah OPD Dinas Kesehatan yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 23. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera, Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya			
Misi I : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah 1	1 Meningkatkan kinerja organisasi kesehatan yang efektif, efisien, dan transparan 1.1	1 Penyempurnaan perencanaan 1.1	1 Penerapan sistem perencanaan berbasis data 1.1
	2 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik 1.2	2 Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 1.2	1 Monitoring dan evaluasi secara regular dan konsisten 1.2 2 Penegakan disiplin dan penilaian kinerja yang objektif
Misi II : Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kualitas pelayanan kesehatan 1	1 Meningkatkan mutu, akses pelayanan kesehatan dan rujukan 1.1	1 Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan rujukan yang berkualitas 1.1	1 Setiap distrik memiliki minimal 1 Puskesmas yang teregistrasi dan tersertifikasi akreditasi 1.1

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			2 Mewujudkan penerapan sistem manajemen kinerja Rumah Sakit sesuai dengan standar 1.2
			3 Pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit Rujukan 1.3
	2 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang berkualitas 1.1	1 Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan anak balita serta peningkatan dan pemenuhan gizi masyarakat 1.1	1 Pelayanan antenatal care (ANC), persalinan di fasyankes oleh tenaga kesehata, pelayanan nifas, pelayanan neonatus, bayi dan anak 1.1

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			2 Penguatan kapasitas SDM dalam melaksanakan supervisi fasilitatif dan pelacakan kasus gizi buruk dan stunting 1.2
			3 Meningkatkan pola hidup bersih dan sehat dan mengaktifkan peran serta masyarakat melalui Posyandu 1.3
			4 Meningkatkan akses air bersih dan sanitasi bagi kampung yang bermasalah air bersih dan sanitas 1.4

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	3 Menurunnya angka kesakitan 1.1	1 Pencegahan penyakit menular, tidak menular dan penyakit endemik khususnya di daerah terpencil 1.1	1 Pengendalian penyakit menular AIDS, TB dan Malaria 1.1
			2 Pencegahan dan pengendalian penyakit Diare, Pneumonia, Ispa dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi 1.2
			3 Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular 1.3
			4 Pemberantasan dan pengendalian penyakit menular endemik, kusta, kaki gajah dan frambusia 1.4

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	4 Meningkatkan sumber daya kesehatan	1 Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan secara merata disemua puskesmas dan jaringannya, dengan prioritas pada peningkatan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran sumberdaya manusia kesehatan	1 Meningkatkan distribusi tenaga dan pengangkatan tenaga lokal/setempat 1.1
			2 Meningkatkan kualitas petugas melalui pelatihan 1.2
			3 Penerapan mekanisme registrasi dan lisensi tenaga dengan uji kompetensi tenaga kesehatan 1.3
			4 Mengembangkan insentif dan penyediaan fasilitas bagi petugas 1.4

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2 Menjamin ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan farmasi di puskesmas dan jaringannya	1 Pengadaan obat-obatan dan buffer stock, pengelolaan obat sesuai standard dan distribusi/pengiriman obat-obatan bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang mengalami kekurangan 2 Membangun sistem informasi dan jaringan informasi terintegrasi di bidang

# BAB VI

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

---

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran pembangunan Kabupaten Jayawijaya pada RPJMD tahun 2018-2023 disusunlah rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan selama lima tahun kedepan. Pedoman tersebut adalah indikator-indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan kinerja dari program dan kegiatan, dilengkapi dengan pendanaan indikatif yang dibutuhkan untuk mencapai target-target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Penentuan program dan kegiatan memperhatikan RPJMD Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023, prioritas pembangunan kesehatan nasional yang tercantum pada Renstra Kementerian RI dan prioritas pembangunan kesehatan Propinsi Papua yang tercantum pada Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Papua, selain itu memperhatikan isu strategis dan potensi masalah bidang kesehatan yang menonjol terjadi Kabupaten Jayawijaya dalam kurung waktu lima tahun kedepan.

Program dan kegiatan yang disusun juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, terutama pada strategis pembangunan kawasan peruntukan fasilitas kesehatan yang berhirarki serta peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan yang memenuhi standar pelayanan. Adapun komposisi program, indikator kinerja, dan kelompok sasaran dalam lima tahun kedepan akan dilaksanakan dengan 6 sasaran strategis adalah sebagai berikut ;

1. Sasaran 1, Meningkatnya Kinerja Organisasi Kesehatan yang Efektif, Efisien, dan Transparan akan dilaksanakan, yaitu dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Sasaran 2, Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik akan dilaksanakan, yaitu dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3. Sasaran 3, Meningkatnya Mutu, Akses Pelayanan Kesehatan dan Rujukan akan dilaksanakan yaitu dengan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
4. Sasaran 4, Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang Berkualitas akan dilaksanakan dengan program, yaitu ;
  - ❖ Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
  - ❖ Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
5. Sasaran 5, Menurunnya Angka Kesakitan akan dilaksanakan dengan program, yaitu ;
  - ❖ Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
  - ❖ Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
6. Sasaran 6, Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan akan dilaksanakan dengan program, yaitu ;
  - ❖ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
  - ❖ Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Untuk detailnya tentang program tersebut, maka berikut penyajian program dan kegiatan beserta indikator serta pendanaan indikatifnya pada tabel di bawah ini.

Tabel 24. Rencana Program dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2018	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra RPJMD Tahun 2024							
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp.						
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
TERWUJUDNYA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI KESEHATAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN TRANSPARAN	1020201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	85	Persen						90		95		100		100		100		100		
		1020201	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	Persen																		
		102020101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja OPD	2	Dok									2	20.000.000		1	5.000.000		1	5.000.000	1	5.000.000
		102020106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja OPD	4	Dok	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000
		102020107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja OPD	2	Dok																		
		1020202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan	100	Persen																		
		102020205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1	Dok	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000
		102020207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	4	Dok	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000
		1020205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
		1	0	0	2	0	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan		Orang					100	65.300.000	100	71.830.000		79.013.000		79.013.000		
		1	0	0	2	0	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek dan Pelatihan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15	Orang				10	250.210.000	10	250.210.000	10	250.210.000	10	250.210.000	10	250.210.000	
		1	0	0	2	0	6	Administrasi Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	100	Persen														
		1	0	0	2	0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Listrik	15	Jenis	11	7.500.000	11	7.500.000	15	11.500.000	15	11.500.000	15	11.500.000	15	11.500.000	15	11.500.000
		1	0	0	2	0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
		1	0	0	2	0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga																
		1	0	0	2	0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan Jenis alat tulis kantor Kantor	215	Jenis	43	100.000.000	43	210.000.000	74	450.000.000	74	450.000.000	74	450.000.000	74	450.000.000	74	450.000.000
		1	0	0	2	0	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Lembar Dokumen yang di Cetak dan Digandakan	99.380	lembar	19.876	10.250.000	19.876	9.938.000	21.864	10.932.000	24.050	12.025.000	26.455	13.227.500	26.455	13.227.500	26.455	13.227.500
		1	0	0	2	0	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah penyediaan bahan/material																
		1	0	0	2	0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Konsultasi yang diikuti	75	Kali	17	310.000.000	17	310.000.000	34	816.000.000	37	888.000.000	40	960.000.000	40	960.000.000	40	960.000.000
		1	0	0	2	0			Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	3.920	Kotak	830	70.550.000	830	70.550.000	913	86.735.000	1.004	95.380.000	1.095	104.025.000	1.186	112.670.000	1.186	112.670.000
		1	0	0	2	0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		1	0	0	2	0	01	Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan mobil dinas jabatan	2	Unit			1	675.000.000	1	742.500.000	1	742.500.000	1	816.750.000	1	816.750.000
		1	0	0	2	0	05	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel	100	Buah					100	1.050.000.000			60	420.000.000		
		1	0	0	2	0	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin		Buah							1	225.700.000			1	225.700.000
		1	0	0	2	0	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pembangunan Gedung Kantor	1	Unit					1	22.527.300.000						
		1	0	0	2	0	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Set							1	185.000.000			1	185.000.000
		1	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen												
		1	0	0	2	0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah meterai	1.500	Buah	300	2.000.000	300	2.000.000	300	2.000.000	300	2.000.000	300	2.000.000	300	2.000.000
		1	0	0	2	0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Pembayaran Rekening Telpon dan Listrik	12	Bulan	12	125.400.000	12	126.600.000	12	126.600.000	12	126.600.000	12	126.600.000	12	126.600.000
		1	0	0	2	0	03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah tenaga perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	1	orang			1	11.500.000	1	11.500.000	1	11.500.000	1	11.500.000	1	11.500.000
		1	0	0	2	0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	33	orang	39	288.000.000	37	289.200.000	41	1.111.428.000	41	1.111.428.000	41	1.111.428.000	41	1.111.428.000
									Jumlah tenaga Sotir Puskesmas Keliling	15	orang	15	180.000.000	15	180.000.000	15	180.000.000	15	180.000.000	15	180.000.000	15	180.000.000
		1	0	0	2	0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		1	0	0	2	0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diayakan pajak setiap tahun	270	Unit	63	42.000.000	71	63.000.000	73	65.800.000	73	65.800.000	73	65.800.000	73	65.800.000
		1	0	0	2	0	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah dan jenis bahan/peralatan perawatan kendaraan dinas/operasional	13	Jenis	13	60.005.000	21	160.000.000	21	663.900.000	21	801.200.000	21	840.800.000	21	840.800.000
		1	0	0	2	0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi/ringan	1	Unit					1	275.425.000	1	275.425.000	1	275.425.000	1	275.425.000
		1	0	0	2	0	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5	Jenis	5	84.632.000	9	12.500.000	15	115.000.000	17	126.500.000	17	139.150.000	17	139.150.000
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis pemeliharaan peralatan gedung kantor		Jenis					3	81.550.000	4	89.705.000	4	98.675.500	4	98.675.500
TERWUJUDNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN	MENINGKATNYA MUTU DAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DAN RUJUKAN	1	0	0	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	60	Persen	65		65,4		73,1		88,8		88,5		88,5	
	MENINGKATNYA PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK YANG BERKUALITAS	1	0	2	1	2	0	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	60	Persen												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	MENURUN YA ANGKA KESAKITA	1 2	0 2	0 1	0 2	0 2	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pembangunan Puskesmas	6	Unit	1	20.617.642.000			3	40.719.593.000	2	29.909.985.600	2	32.900.984.160	2	32.900.984.160
		1 2	0 2	0 1	0 2	0 2	03	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pembangunan Puskesmas Pembantu		Unit					1	6.625.000.000			1	6.107.500.000	1	6.107.500.000
		1 2	0 2	0 1	0 2	0 2	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	10	Unit		20	20.814.412.000				5	5.723.963.300	5	6.296.359.630	5	6.296.359.630
		1 2	0 2	0 1	0 2	0 2	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang di Rehabilitasi	1	Unit		1	13.701.961.000	1	15.072.157.100		1	16.579.372.610	1	18.237.310.091	1	18.237.310.091
		1 2	0 2	0 1	0 2	0 2	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Puskesmas Pembantu yang di Rehabilitasi		Unit					1	3.075.000.000		2	6.765.000.000	2	6.765.000.000	
		1 2	0 2	0 1	0 2	0 2	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas Kelling	11	Unit		2	1.480.000.000					2	1.628.000.000	2	1.628.000.000	
		1 2	0 2	0 1	0 2	0 2	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7	Set/Kit		13	5.096.262.060					13	5.561.910.266	13	5.561.910.266	
		1 2	0 2	0 1	0 2	0 2	16	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah dan Jenis Obat	168	Jenis	224	3.082.737.840	224	3.391.011.624	224	3.730.112.786	224	4.103.124.065	224	4.513.436.472	224	4.964.780.119
		1 2	0 2	0 1	0 2	0 2	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah dan Jenis Bahan Habis Pakai (BHP)	122	Jenis						3.256.961.800	156	3.582.680.000	172	3.940.948.000	189	4.335.042.800
		1 2	0 2	0 2	0 2	0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen												
		1 2	0 2	0 2	0 2	0 2	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah dokumen audit materai perinatal (AMP)	2	Dok	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
									Jumlah Puskesmas PONEB yang dilayani oleh dokter spesialis obgyn	2	PKM					2	90.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000
									Jumlah ibu hamil yang mengikuti kegiatan I kelas ibu hamil	20	Bumil	20	22.080.000	30	29.288.000	35	31.716.800	40	37.080.000	40	37.060.000	40	3.706.000
		1	0	0	2	0	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu hamil yang bersalin di fasilitas kesehatan	577	Bumil	543	1.478.000.000	543	1.478.000.000	577	2.671.280.000	577	2.938.408.000	577	2.938.408.000	577	2.938.408.000
									Jumlah ibu bersalin yang mendapat paket persalinan	100	Bumil					200	285.000.000	250	356.250.000	250	356.250.000	250	356.250.000
		1	0	0	2	0	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Anak Balita yang mengikuti kegiatan kelas Anak Balita	20	balita	20	22.080.000	30	29.288.000	35	31.716.800	40	37.080.000	40	37.060.000	40	3.706.000
									Jumlah peserta pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)		Orang					18	325.000.000	18	325.000.000	18	325.000.000	18	325.000.000
									Jumlah peserta kegiatan penguatan Pembinaan kader kesehatan, Guru, PAUD/TK/RA tentang Buku KIA dan stimulasi, Deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang (SDDTK)		Orang					50	85.000.000			50	85.000.000	50	85.000.000
		1	0	0	2	0	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah anak balita gizi buruk dan Stunting yang mendapat perawatan	40	Anak Balita/Stunting	6	1.260.000.000	20	2.250.000.000	11	1.362.000.000	10	1.209.000.000	8	1.056.000.000	8	1.056.000.000
		1	0	0	2	0	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah tempat kerja yang melaksanakan kesehatan kerja dan olahraga		Tempat Kerja					4	92.000.000	6	115.000.000	10	120.750.000	10	122.187.500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		1	0	0	2	0	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah tempat pengolahan makan dan pengolahan air minum	92	TPM					160	17.850.000	200	25.500.000	200	25.500.000	200	25.500.000
		1	0	0	2	0	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat kepada masyarakat	10	Paket			10	5.394.572.892	10	5.394.572.892	10	5.394.572.892	10	5.394.572.892	10	5.394.572.892
		1	0	0	2	0	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Desa yang Dilakukan Surveillance Penyakit Menular	328	Desa			328	275.000.000	328	302.500.000	328	332.750.000	328	366.025.000	328	366.025.000
		1	0	0	2	0	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah pertemuan bulanan wilayah program penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12	bulan			12	136.620.000	12	136.620.000	12	136.620.000	12	136.620.000	12	136.620.000
									Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan penanggulangan penyakit menular	4	Kali					4	44.400.000	4	44.400.000	4	44.400.000	4	44.400.000
		1	0	0	2	0	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	202.150	Orang	202.150	15.364.545.744	202.150	15.364.545.744	202.150	15.364.545.744	202.150	15.364.545.744	202.150	15.364.545.744	202.150	15.364.545.744
		1	0	0	2	0	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah sampel yang dikirim ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Sampel			60	128.800.000	66	139.600.000	73	152.200.000	73	136.620.000	73	136.620.000
		1	0	0	2	0	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang mendapat Bantuan Operasional Puskesmas	13	PKM	13	13.752.000.000	18	19.041.230.769	18	19.041.230.769	18	19.041.230.769	18	19.041.230.769	18	19.041.230.769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
									Jumlah Puskesmas PONED yang dilayani oleh dokter spesialis obgyn	2	PKM					2	90.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000
									Jumlah ibu hamil yang mengikuti kegiatan I kelas ibu hamil	20	Bumil	20	22.080.000	30	29.288.000	35	31.716.800	40	37.080.000	40	37.060.000	40	3.706.000
		1	0	0	2	0	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu hamil yang bersalin di fasilitas kesehatan	577	Bumil	543	1.478.000.000	543	1.478.000.000	577	2.671.280.000	577	2.938.408.000	577	2.938.408.000	577	2.938.408.000
									Jumlah ibu bersalin yang mendapat paket persalinan	100	Bumil					200	288.000.000	250	356.250.000	250	356.250.000	250	356.250.000
		1	0	0	2	0	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Anak Balita yang mengikuti kegiatan kelas Anak Balita	20	balita	20	22.080.000	30	29.288.000	35	31.716.800	40	37.080.000	40	37.060.000	40	3.706.000
									Jumlah peserta pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)		Orang					18	325.000.000	18	325.000.000	18	325.000.000	18	325.000.000
									Jumlah peserta kegiatan penguatan Pembinaan kader kesehatan, Guru, PAUD/TK/RA tentang Buku KIA dan stimulasi, Deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang (SDOTK)		Orang					50	88.000.000			50	88.000.000	50	88.000.000
		1	0	0	2	0	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah anak balita gizi buruk dan Stunting yang mendapat perawatan	40	Anak Balita/Stunting	6	1.260.000.000	20	2.250.000.000	11	1.362.000.000	10	1.209.000.000	8	1.056.000.000	8	1.056.000.000
		1	0	0	2	0	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah tempat kerja yang melaksanakan kesehatan kerja dan olahraga		Tempat Kerja					4	92.000.000	6	115.000.000	10	120.750.000	10	122.187.500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		1	0	0	2	0	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah tempat pengolahan makan dan pengolahan air minum	92	TPM					160	17.850.000	200	25.500.000	200	25.500.000	200	25.500.000
		1	0	0	2	0	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat kepada masyarakat	10	Paket			10	5.394.572.892	10	5.394.572.892	10	5.394.572.892	10	5.394.572.892	10	5.394.572.892
		1	0	0	2	0	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Desa yang Dilakukan Surveillance Penyakit Menular	328	Desa			328	275.000.000	328	302.500.000	328	332.750.000	328	366.025.000	328	366.025.000
		1	0	0	2	0	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah pertemuan bulanan wilayah program Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12	bulan			12	136.620.000	12	136.620.000	12	136.620.000	12	136.620.000	12	136.620.000
									Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan penanggulangan penyakit menular	4	Kali				4	44.400.000	4	44.400.000	4	44.400.000	4	44.400.000	
		1	0	0	2	0	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	202.150	Orang	202.150	15.364.545.744	202.150	15.364.545.744	202.150	15.364.545.744	202.150	15.364.545.744	202.150	15.364.545.744	202.150	15.364.545.744
		1	0	0	2	0	28	Pengambilan dan Pengiriman Specimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah sampel yang dikirim ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Sampel			60	128.800.000	66	139.600.000	73	152.200.000	73	136.620.000	73	136.620.000
		1	0	0	2	0	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang mendapat Bantuan Operasional Puskesmas	13	PKM	13	13.752.000.000	18	19.041.230.769	18	19.041.230.769	18	19.041.230.769	18	19.041.230.769	18	19.041.230.769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		1	0	0	2	0	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah bantuan operasional Pelayanan Kesehatan pada fasilitas kesehatan yang tidak memiliki tenaga kesehatan	3	Distrik	4	3.000.000.000	4	3.000.000.000	4	3.000.000.000	5	4.275.000.000	5	4.275.000.000	5	4.275.000.000
		1	0	0	2	0	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	4	PKM	2	700.000.000	2	70.000.000	4	1.540.000.000	4	1.694.000.000	4	1.863.400.000	4	1.863.400.000
		1	0	0	2	0	3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Cakupan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	100	Persen												
		1	0	0	2	0	03	Pengadaan Abt/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah penyediaan sistem informasi kesehatan dan jaringan internet-logistik	1	Paket	1	362.720.000	1	362.720.000	1	362.720.000	1	362.720.000	1	362.720.000	1	362.720.000
		1	0	0	2	5		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>														
		1	0	0	2	0	1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Cakupan Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat	100	Persen												
		1	0	0	2	5	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah mitra jejaring kerja dalam rangka upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan	397	Kader	397	1.191.000.000	402	1.206.000.000	407	1.221.000.000	412	1.236.000.000	417	1.251.000.000	427	1.261.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
		1	0	0	2	0		<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen														
		1	0	0	2	0	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah sekolah melaksanakan kegiatan promosi kesehatan serta Gerakan Hidup Bersih	23	Sekolah						23	75.000.000	23	75.000.000	23	75.000.000	23	75.000.000	
		1	0	0	2	0		<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27,5	Persen														
		1	0	0	2	0	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan	Jumlah Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan		Desa							11	97.200.000	14	106.920.000	16	117.612.000		
	MENINGKATKAN SUMBER DAYA KESEHATAN	1	0	0	2	0		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	95	Persen	95		77			79		81		83		83		
		1	0	0	2	0	01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	100	Persen														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		1	0	0	2	0	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah monitoring dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	4	kal							4	22.500.000	4	22.500.000	4	22.500.000
		1	0	0	2	0	02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Cakupan perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100	Persen												
		1	0	0	2	0	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	63	PTT	63	4.038.000.000	81	5.082.000.000	93	5.776.000.000	105	6.474.000.000	117	7.170.000.000	117	7.170.000.000
		1	0	0	2	0	03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen												
		1	0	0	2	0	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	105	Orang			277	1.312.500.000	344	1.575.000.000	273	1.417.500.000	185	1.275.750.000	185	1.275.750.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		1	0	0				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PERSENTASE SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	100	Persen												
		1	0	0	2	0		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100	Persen												
		1	0	0	2	0	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diawasi	34	Apotik					34	27.200.000	34	27.200.000	34	27.200.000	34	27.200.000
		1	0	0	2	0	3	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100	Persen												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		1 2	0 4	0 2	2 0	0 3	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Industri Rumah Tangga yang diawasi	70	IRT					70	97.745.000	70	107.519.500	70	118.271.450	70	130.089.595
		1 2	0 4	0 2	2 0	0 4		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Cakupan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100	Persen												
		1 2	0 4	0 2	2 0	0 4		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum yang diawasi	60	Lokasi					60	81.000.000	60	81.000.000	60	81.000.000	60	81.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		1 2	0 4	0 2	2 5	0 5		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan dan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Cakupan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	100	Persen												
		1 2	0 4	0 2	2 5	0 5	01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah lokasi Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang diawasi dan dibina	60	Lokasi					60	81.000.000	60	81.000.000	60	81.000.000	60	81.000.000
		1 2	0 4	0 2	2 6	0 6		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Cakupan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	100	Persen												
		1 2	0 4	0 2	2 6	0 6	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	70	IRT					70	97.745.000	70	107.519.500	70	118.271.450	70	130.089.595

# BAB VII

## KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Jayawijaya 2018-2023, sebagai berikut ;

NO	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	<b>MENINGKATNYA KINERJA ORGANISASI KESEHATAN YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN TRANSPARAN</b>							
	1. Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil hasil Pemeriksaan BPK pada Dinas Dinas Kesehatan	85	90	95	100	100	100	100
II	<b>MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK</b>							
	1 Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	0	84	85	86	87	88	88
	2 Tingkat Kepuasan Internal Pegawai Dinas Kesehatan terhadap Layanan Kesekretariatan (Skala 10)				3	5	8	8
III	<b>MENINGKATNYA MUTU DAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DAN RUJUKAN</b>							
	1 Persentase Distrik memiliki minimal 1 Puskesmas yang teregistrasi	60	65	65,4	73,1	80,8	88,5	88,5
	2 Persentase puskesmas yang terakreditasi	30,8	46,2	61,5	76,9	92,3	100	100
	3 Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	28,7	80	85	90	90	90	90
	4 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien		100	100	100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>IV</b>	<b>MENINGKATNYA PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK YANG BERKUALITAS</b>							
	1. Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil (K-4)	28,5	100	100	100	100	100	100
	2. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (Pf)	36,8	100	100	100	100	100	100
	3. Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	42,2	100	100	100	100	100	100
	4. Persentase anak usia 0-59 bulan mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan standar	38	100	100	100	100	100	100
	5. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	18,78	100	100	100	100	100	100
	6. Persentase warga Negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	28,7	100	100	100	100	100	100
	7. Prevalensi balita sangat kurus dan kurus (Stunting)		27	26,8	26	25,5	25	25
	8. Cakupan (%) balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	100
	9. Cakupan (%) masyarakat akses terhadap air bersih		11	20	30	40	50	50
	10. Cakupan (%) keluarga akses terhadap sanitasi		18	20,5	24,5	28,5	32,5	32,5
	11. Cakupan (%) PHBS	20	25	27,5	30	32,5	35	35
<b>V</b>	<b>MENURUNNYA ANGKA KESAKITAN</b>							
	1. Persentase warga Negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		100	100	100	100	100	100
	2. Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	0,51	100	100	100	100	100	100
	3. Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0,11	100	100	100	100	100	100
	4. Persentase ODJG berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		100	100	100	100	100	100
	5. Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	32	100	100	100	100	100	100
	6. Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	60	100	100	100	100	100	100
	7. Pencapaian API (Annual Parasite Incident)	2	1	<1	<1	<1	<1	<1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8 Persentase pemberian obat pencegahan Filariasis	74	100	100	100	100	100	100
	9 Penemuan kasus non AFP rate (Kurang dari 15 Tahun)	75	100	100	100	100	100	100
	10 Persentase kelurahan/desa UCI	6,55	6,55	7,44	8,93	10,42	11,9	11,9
	11 Penemuan kasus baru penderita kusta		0,000 5	0,000 5	0,000 5	0,000 5	0,000 5	0,0005
	12 Persentase penurunan kasus penderita diare (<5 Tahun)		15,6	20,9	17,8	16,9	17,7	17,7
	13 Persentase penurunan kasus penderita pneumonia (<14 Tahun)		11,7	8,7	9,7	8,7	7,7	7,7
	14 Persentase penurunan kasus penderita Ispa (<5 Tahun)		2,9	3	3	3	3	3
<b>VI</b>	<b>MENINGKATNYA SUMBER DAYA KESEHATAN</b>							
	1 Persentase puskesmas yang memenuhi standar ketenagaan minimal 5 jenis tenaga (perawat, bidan, kesling, gizi dan analis kesehatan)	50	57,6	65,4	73,1	80,8	88,5	88,5
	2 Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		54,4	57,1	59,8	62,6	65,3	65,3
	3 Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial		83	85	90	92	94	94
	4 Persentase Kabupaten/Kota dengan ketersediaan obat program tuberkulosis		100	100	100	100	100	100
	5 Persentase Kabupaten/Kota dengan ketersediaan obat program HIV/AIDS		100	100	100	100	100	100
	6 Persentase Kabupaten/Kota dengan ketersediaan obat program malaria yang disediakan		100	100	100	100	100	100
	7 Persentase Kabupaten/Kota dengan ketersediaan obat kesehatan dan perbekalan kesehatan program ibu dan anak		100	100	100	100	100	100
	8 Persentase Kabupaten/Kota dengan ketersediaan vaksin imunisasi dasar lengkap esensial		91	91	92	93	94	94
	9 Persentase Kabupaten/Kota dengan ketersediaan gizi		100	100	100	100	100	100
	10 Penerapan aplikasi logistic obat dan BMHP di instalasi Farmasi Propinsi dan Kab/Kota			68	136	204	272	272
	11 Persentase Kabupaten/Kota dengan ketersediaan obat esensial			77	79	81	83	83
	12 Persentase ketersediaan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar	15,4	23,1	30,8	32,3	34,6	36,4	36,4

# BAB VIII

## PENUTUP

---

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 telah disusun dengan memperhatikan Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 serta prioritas daerah bidang kesehatan yang akan dihadapi dalam waktu 5 (lima) tahun akan datang.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan indikator kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya dibidang/urusan kesehatan, selanjutnya Resntra Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya ini akan ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2013 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Dinas Kesehatan dalam kurung waktu lima tahun kedepan. Dengan demikian unit kerja dilingkup Dinas Kesehatan mempunyai target kinerja yang telah ditetapkan dan akan dievaluasi pada pertengahan dan akhir periode 5 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Keberhasilan pencapaian Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 tersebut sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh jajaran di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menjadi unit bawahannya. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan Renstra ini, secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan dan pengendalian melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya.

Pada akhirnya diharapkan melalui Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 ini dapat mencapai tujuan dan dapat memberi kontribusi nyata bagi pencapaian RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

Wamena, 9 Maret 2021

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Jayawijaya,



**Dr. WILLY E. MAMBIEUW, Sp. B**  
**NIP. 19681118 20012 1 003**

LAMPIRAN

Lampiran . Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya  
Tahun 2013-2018

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RATIO ANTAR REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Tidak Langsung	7.728.565.494	8.002.522.900	8.759.418.099	9.176.218.349	8.383.880.087	7.310.044.147	7.939.620.625	8.288.079.385	8.102.155.768	8.148.921.080	95	99	95	88	97	35.343.500.855	33.269.284.141
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	3.600.000	1.200.000	4.500.000	2.000.000	2.400.000	3.600.000	1.200.000	4.500.000	2.000.000	100	100	100	100	100	12.100.000	12.100.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik	58.800.000	92.400.000	106.800.000	74.275.000	31.800.000	22.282.743	57.898.589	90.763.356	74.258.370	31.244.388	38	63	85	100	98	338.835.000	251.451.936
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dn Perizinan Kendaraan	5.000.000	97.500.000	36.400.000	36.400.000	42.000.000	5.000.000	76.712.400	36.400.000	32.326.200	35.615.000	100	79	100	89	85	183.700.000	157.561.600
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		145.200.000	189.600.000	199.200.000	289.200.000		145.200.000	189.600.000	134.400.000	258.300.000		100	100	67	89	591.840.000	520.860.000
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2.800.000					2.800.000					100					2.800.000	2.800.000
Penyediaan ATK	38.300.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	100.000.000	38.300.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	100.000.000	100	100	100	100	100	808.300.000	808.300.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62.000.000	275.000.000	450.000.000	163.794.000	14.938.000	61.996.650	275.000.000	442.401.100	163.786.400	14.937.800	100	100	98	100	100	953.781.600	946.153.910
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BK	1.000.000	12.500.000	12.500.000	17.620.000	23.375.000	1.000.000	12.500.000	12.500.000	17.620.000	23.375.000	100	100	100	100	100	48.295.000	48.295.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				39.000.000					39.000.000					100		39.000.000	39.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	33.900.000	405.250.000	400.350.000	174.000.000	59.050.000	33.845.000	405.121.000	380.983.000	173.980.000	59.050.000	100	100	95	100	100	1.025.310.000	1.005.739.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	257.500.000	610.000.000	840.478.000	350.144.000	231.980.000	231.512.501	609.718.029	836.458.019	349.987.897	231.943.227	90	100	100	100	100	2.104.518.000	2.074.064.891
Sosialisasi/Penyuluhan/ Survei Lapangan/Monitoring Dalam Daerah				193.300.000	64.000.000				190.900.000	63.925.000				99	100	206.100.000	203.685.000
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS		4.031.400.000	5.141.520.000	5.645.400.000	5.075.400.000		3.210.900.000	4.914.920.000	5.157.520.000	5.057.494.025		80	96	91	100	15.833.400.000	14.294.838.805
Pembangunan Rumah Dinas					13.556.849.620					13.230.129.000					98	2.711.369.924	2.646.025.800
Pembangunan Gedung Kantor			5.746.096.000		2.598.844.000			5.627.480.000		2.563.830.000			98	99		6.265.823.800	6.140.246.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	495.000.000			175.000.000	610.000.000	492.489.000			174.286.544	600.780.000	99			100	98	792.000.000	786.927.544
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		150.000.000		21.000.000			150.000.000		21.000.000			100		100		171.000.000	171.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		80.338.000			102.000.000		60.338.000				-	100			-	80.738.000	60.338.000
Pembangunan Perlengkapan Gedung Kantr			100.000.000					100.000.000					100			100.000.000	100.000.000
Pembangunan Peralatan Gedung Kantor			289.750.000					289.750.000					100			289.750.000	289.750.000
Pendamping Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	49.500.000						-									49.500.000	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantr	17.200.000	99.988.000	124.958.000	194.918.150	194.880.000	17.200.000	99.988.000	124.958.000	194.873.150	194.880.000	100	100	100	100	100	476.040.150	475.795.150
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantr	70.250.000	202.624.500	299.997.000	358.970.000	60.005.000	32.840.000	202.294.000	285.534.409	358.946.800	60.005.000	47	100	95	100	100	941.842.500	889.616.209
Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor			2.500.000.000					2.495.555.000					100			2.500.000.000	2.495.555.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		147.170.000					146.570.000					100				147.170.000	146.570.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				243.500.000	197.129.100				243.064.788	197.129.100			100	100		282.925.820	282.490.618
Pelatihan Tenaga Pengelola Program Malaria			54.000.000	75.000.000	75.000.000			48.880.000	70.723.000	70.623.000			90	94	94	144.000.000	133.527.600
Pelatihan Tenaga Pengelola Kusta Puskesmas			53.650.000					49.482.700					92			53.650.000	49.482.700
Penetapan Angka Kredit Rumpun Kesehatan Jabatan Fungsional			42.350.000	40.600.000	57.187.000			42.350.000	40.600.000	56.603.800			100	100	99	94.387.400	94.270.760
Pelatihan HIV-AIDS Secara Reguler				138.100.000					120.647.800					87		138.100.000	120.647.800
Pelatihan Tentang TB DOTS				146.470.000					125.031.669					85		146.470.000	125.031.669
Pelatihan Pengelola Imunisasi Puskesmas				88.000.000					82.192.000					93		88.000.000	82.192.000
Pelatihan Tenaga Laboratorium Mikro dan RDT/OJT Puskesmas				75.000.000					70.084.200					93		75.000.000	70.084.200
Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kesehatan Ibu dan Anak Bagi Bidan Desa				88.000.000	100.000.000				84.925.000	92.049.000				97	92	108.000.000	103.334.800
Pelatihan Bidan Penyelia Puskesmas				88.000.000					81.104.996					92		88.000.000	81.104.996
Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN)				300.000.000	100.000.000				255.952.000	-				85	-	320.000.000	255.952.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelatihan Tenaga Kesehatan dan Guru TK Menjadi Tenaga Fasilitator Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)				71.900.000					71.900.000					100		71.900.000	71.900.000
Pelatihan Pengukuran Status Gizi				73.600.000					73.225.000					99		73.600.000	73.225.000
Pelatihan Pengelola Obat Puskesmas				95.000.000					88.619.000					93		95.000.000	88.619.000
Pelatihan Pelayanan Informasi Obat dan Penggunaan Obat Rasional				108.000.000					64.778.600					61		108.000.000	64.778.600
Pelatihan Tenaga Kesehatan Kerja				97.000.000					91.562.000					94		97.000.000	91.562.000
Pelatihan Pengembangan Obat Tradisional				130.900.000					125.586.000					96		130.900.000	125.586.000
Pelatihan Manajemen Puskesmas				155.280.000	174.053.000				150.148.800	128.453.000				97	74	190.070.600	175.839.400
Pelatihan TB Resistensi Obat					75.000.000					73.235.000				98		15.000.000	14.647.000
Pelatihan Sertifikat Penyuluhan Pangan Industri Rumah Tangga					176.160.000					124.125.000				70		35.232.000	24.825.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	19.750.000	45.000.000	45.730.000	15.000.000	-	19.750.000	45.000.000	45.730.000	15.000.000	-	100	100	100	100	138.480.000	113.480.000
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.918.560.000	1.400.000.000	5.029.470.000	2.282.874.000	3.745.493.000	2.873.804.502	1.400.000.000	4.278.896.440	2.188.123.060	3.581.497.280	98	100	85	96	96	12.380.002.600	11.458.925.458
Peningkatan Pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	113.500.000	200.000.000	280.000.000	3.500.000.000	4.000.000.000	85.890.000	195.900.000	285.250.000	3.389.303.077	3.972.841.846	75	98	95	97	99	4.893.500.000	4.730.711.446
Pendamping Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	291.856.000	140.000.000				270.097.698	132.300.000				93	95				431.856.000	402.397.698
Peningkatan, Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan		1.499.977.088					1.283.849.650					98				1.499.977.088	1.283.849.650
Desentralisasi Obat ARV				95.000.000					95.000.000					100		95.000.000	95.000.000
Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan			700.003.000					698.670.000					100			700.003.000	698.670.000
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di PKM & Jaringan	8.022.800.000	5.000.000.000		1.750.000.000	1.500.000.000	5.875.821.700	1.275.568.600		1.742.927.000	1.499.319.000	73	28		100	100	15.072.800.000	9.193.981.100
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	2.320.478.370				350.000.000	1.933.993.380				198.895.000	83				57	2.390.478.370	1.973.772.380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Peningkatan Kesehatan Masyarakat	11.420.046.000	17.453.414.135	21.038.060.412	15.364.545.744	15.364.545.744	10.528.364.502	15.614.664.000	14.777.665.500	13.699.331.068	13.961.636.454	92	89	70	90	91	68.348.975.440	57.612.552.361
Pelayanan Kesehatan Penduduk Makin di PKM & Jaringan (L)		33.993.600					-					-				33.993.600	-
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan			3.599.182.000					3.302.148.500					83			3.599.182.000	3.302.148.500
Bantuan Operasional Kesehatan			4.511.000.000	9.488.278.000	11.295.792.000			2.812.514.427	6.702.798.000	8.799.172.128			62	71	78	16.256.438.400	11.275.148.852
Penyediaan Bahan Logistik				399.945.000					256.121.000					64		399.945.000	256.121.000
Peningkatan Kesehatan Masyarakat (L)			40.440.000					40.440.000					100			40.440.000	40.440.000
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan & Bahan	100.000.000						99.838.000				100					100.000.000	99.838.000
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat		528.800.000			100.000.000		528.800.000			100.000.000		100		100		948.800.000	948.800.000
Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Siaga Aktif					100.000.000					81.825.000					82	20.000.000	16.365.000
Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan	60.000.000		100.000.000				53.200.000		98.997.000			89		99		160.000.000	152.197.000
Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan	65.000.000	100.000.000					65.000.000	100.000.000				100	100			165.000.000	165.000.000
Pembangunan Area Smoking/Ruangan Merokok		480.000.000						-					-			480.000.000	-
Penyuluhan Berprilaku Beresiko Akibat Merokok, HIV/AIDS, NAPZA		135.000.000					56.600.000						42			135.000.000	56.600.000
Penyebarluasan Informasi Media Cetak Penyuluhan Promkes		641.238.980					641.116.000						100			641.238.980	641.116.000
Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Siaga Aktif		125.000.000						124.925.000					100			125.000.000	124.925.000
Produksi, Replikasi, Distribusi Buku Kesehatan Ibu Anak		256.000.000						255.550.000					100			256.000.000	255.550.000
Fasilitas Biaya PKL D3 Keperawatan				200.000.000	250.000.000				200.000.000	250.000.000				100	100	250.000.000	250.000.000
Sosialisasi Penggunaan Kelambu Kepada Masyarakat				97.510.000					96.260.000						99	97.510.000	96.260.000
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	700.000.000	600.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	696.160.000	599.810.000	500.000.000	487.535.000	489.850.000	99	100	100	98	2.400.000.000	2.381.475.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi	70.000.000	120.000.000	75.000.000			69.000.000	120.000.000	75.000.000				99	100	100		285.000.000	284.000.000
Monitoring, Pembinaan, Pengembangan Kampung Siaga Aliah		128.000.000	300.000.000				128.000.000	300.000.000					100	100		428.000.000	428.000.000
Swiping Pemberian Kapsul Vitamin Dosis Tinggi		127.350.000	100.000.000				125.700.000	100.000.000					99	100		227.350.000	225.700.000
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A				75.000.000	75.000.000				75.000.000	72.600.000				100	97	90.000.000	89.520.000
Gizi 1000 Hari Kehidupan				1.903.393.500	500.000.000				1.088.293.000	353.835.000				57	71	2.003.393.500	1.159.060.000
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat			260.480.000					260.475.000					100			260.480.000	260.475.000
Pengawasan hygiene dan Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan			25.000.000	125.000.000				24.875.000	117.299.634				99	94		150.000.000	141.974.634
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat			215.111.000					197.228.000					92			215.111.000	197.228.000
Penyelenggaraan Lingkungan Sehat (EHRA)			325.227.000					324.447.000					100			325.227.000	324.447.000
Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah	60.000.000	300.000.000	250.000.000	74.900.000	200.000.000	59.500.000	299.725.000	248.000.000	38.800.000	199.875.000	99	100	99	52	100	724.900.000	686.100.000
Pelayanan Pencegahan & Penanggulangan Peny. Menular	150.000.000	627.238.514	500.000.000			149.670.000	625.597.386	463.090.000			100	100	93			1.277.238.514	1.238.367.386
Peningkatan Imunisasi	200.000.000		213.400.000	75.000.000	75.000.000	198.150.000		213.200.000	60.150.000	74.800.000	99		100	80	100	503.400.000	488.460.000
Peningkatan Surveillance epid dan penanggulangan wabah	75.000.000		200.000.000	300.000.000	200.000.000	75.000.000		197.850.000	291.300.000	199.275.000	100		99	97	100	615.000.000	604.005.000
Penyelenggaraan Pelatihan Dalam Peningkatan Pelayanan imunisasi	63.520.000					62.509.000					98					63.520.000	62.509.000
Pelatihan Pengelola Program TB PKM (DOTS)	70.000.000					68.925.000					98					70.000.000	68.925.000
Pemberian Obat Massal Pencegahan Filariasis			275.552.000					78.139.750					28			275.552.000	78.139.750
Pembentukan TIM KIPPI			318.832.000					111.012.000					35			318.832.000	111.012.000
Penemuan dan Pengambilan Specimen Kasus AFP				88.000.000					47.150.000					54		88.000.000	47.150.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penemuan/Pelacakan Penderita Pneumonia				75.000.000					57.150.000					76		75.000.000	57.150.000
Penemuan/Pelacakan Penderita Diare Pada Bayi dan Anak Balita				75.000.000					70.000.000					93		75.000.000	70.000.000
Pemeriksaan Penderita TBC Semua Tipe				113.185.000					56.600.000					50		113.185.000	56.600.000
Pelacakan/ Penemuan Pasien Lost to Follow Up Putus Berobat ARV				75.000.000					21.700.000					29		75.000.000	21.700.000
VCT Mobile Menemukan Pasien HIV Baru dan Diobati ARV				75.000.000	431.015.600				74.975.000	181.030.000				100	42	181.203.120	111.181.000
Pembiayaan Pemeriksaan Slide Malaria					60.800.000					17.600.000					29	12.120.000	3.520.000
Pelacakan/ Penemuan Pasien Lost to Follow Up Putus Berobat TB				75.000.000					26.800.000					38		75.000.000	26.800.000
Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas				685.692.000	700.000.000				586.843.199	693.733.000				80	99	825.692.000	725.589.799
Penyusunan Standar Kesehatan	73.000.000	75.000.000	100.000.000				72.966.690	74.800.000	92.402.000			100	100	92		246.000.000	240.166.690
Pembangunan dan Pemeliharaan Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	70.000.000						67.366.000					96				70.000.000	67.366.000
Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pelayanan Kesehatan	290.000.000						289.360.800					100				290.000.000	289.360.800
Orientasi Praktek Kerja Lapangan D III Keperawatan/ Kesehatan	260.000.000						260.000.000					100				260.000.000	260.000.000
Penetapan Angka Kredit Rumpun Kesehatan Jabatan Fungsional	50.000.000						50.000.000					100				50.000.000	50.000.000
Pembangunan Puskesmas	4.827.260.000		16.942.901.000	15.738.116.600	30.124.433.000	4.827.259.900		16.903.682.000	15.709.140.000	29.621.506.047	100	100	100	96		43.533.164.200	43.364.383.109
Pengadaan Puskesmas Keliling			1.927.312.000	3.200.000.000	6.328.000.000			1.927.311.999	3.197.950.000	6.323.940.000			100	100	100	6.392.912.000	6.390.049.999
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	576.380.000		3.556.589.000	2.113.386.000	37.037.822.280	576.380.000		3.556.500.000	2.105.660.003	36.813.923.492	100	100	100	99		13.657.919.456	13.602.324.701
Pendamping Pembangunan Puskesmas	482.726.000						469.075.308					97				482.726.000	469.075.308
Pendamping Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	57.636.000						57.635.000					100				57.636.000	57.635.000
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas	957.633.800	7.766.210.000			745.350.000	966.793.000	7.766.210.000			695.700.000	100	100			93	8.874.913.800	8.864.143.000
Pengadaan Meubelair Puskesmas	129.424.700		499.030.000	135.200.000		129.000.000		499.000.000	135.200.000		100	100	100			763.654.700	763.200.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Peningkatan Puskesmas Pembantu Menjadi Puskesmas			7.193.580.000					7.182.980.000					100			7.193.580.000	7.182.980.000
Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap		230.395.000			11.973.408.100		215.322.600			7.680.856.025		93		64		2.625.076.620	1.751.493.805
Pendamping Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas		776.821.000					756.350.000					97				776.821.000	756.350.000
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai		800.000.000					796.000.000					100				800.000.000	796.000.000
Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita				216.000.000					180.270.700					83		216.000.000	180.270.700
Penyuluhan Kesehatan bg Ibu Hamil & Kel Krg Mampu	295.000.000			100.000.000	100.000.000	212.350.000			89.725.000	99.950.000	72		90	100		415.000.000	322.065.000
Perawatan Berkala bg Ibu Hamil dr Kel. Krg Mampu	416.889.300		100.000.000	325.000.000	325.000.000	-		100.000.000	318.000.000	320.000.000	-	100	98	98		906.889.300	482.000.000
Pertolongan Persalinan bg Ibu Hamil dr Kel. Krg Mampu	287.000.000		352.000.000	225.000.000	150.000.000	-		351.948.800	183.600.000	115.800.000	-	100	82	77		894.000.000	558.709.800
Pelatihan Fasilitator APN	278.000.000					277.688.000						100				278.000.000	277.688.000
Jaminan Persalinan Normal (JAMPERSAL)			1.648.930.000	2.054.969.000	2.671.280.000			481.999.800	1.196.527.001	2.199.146.691			29	58	82	4.238.175.000	2.118.366.139
Pengembangan Sistem dan Layanan Informasi Obat		435.100.000	937.500.000					434.800.000	937.000.000			100	100			1.372.600.000	1.371.800.000
Pendamping Pengembangan Sistem dan Layanan Informasi Obat		43.510.000						26.140.000				60				43.510.000	26.140.000
Penyusunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Manajemen Pusat Kesehatan (E-Puskesmas)			997.200.000	425.466.400				997.000.000	424.000.000				100	100		1.422.666.400	1.421.000.000
Pengkajian Dampak Lingkungan					1.396.696.000					704.160.000					50	279.739.200	140.832.000
JUMLAH	44.599.127.676	55.030.289.733	98.537.665.535	81.154.280.773	162.710.966.547	39.662.210.763	47.644.936.927	86.968.821.239	72.532.729.594	150.734.394.447	89	87	88	89	93	311.663.757.037	276.975.579.303

Lampiran . Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya  
Tahun 2013-2018

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RATIO ANTAR REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Tidak Langsung	7.728.565.494	8.002.522.900	8.759.418.099	9.176.218.349	9.383.880.067	7.310.044.147	7.939.620.625	8.288.079.385	8.102.155.788	8.146.921.080	95	99	95	88	97	35.343.500.855	33.269.284.141
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	3.600.000	1.200.000	4.500.000	2.000.000	2.400.000	3.600.000	1.200.000	4.500.000	2.000.000	100	100	100	100	100	12.100.000	12.100.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik	58.800.000	92.400.000	106.800.000	74.275.000	31.800.000	22.282.743	57.998.589	90.763.356	74.258.370	31.244.388	38	63	85	100	96	338.635.000	251.451.936
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dn Perizinan Kendaraan	5.000.000	97.500.000	36.400.000	36.400.000	42.000.000	5.000.000	76.712.400	36.400.000	32.328.200	35.615.000	100	79	100	89	85	183.700.000	157.561.600
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		145.200.000	189.600.000	199.200.000	289.200.000		145.200.000	189.600.000	134.400.000	256.300.000		100	100	67	89	591.840.000	520.880.000
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2.800.000					2.800.000					100					2.800.000	2.800.000
Penyediaan ATK	36.300.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	100.000.000	36.300.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	100.000.000	100	100	100	100	100	808.300.000	808.300.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62.000.000	275.000.000	450.000.000	163.794.000	14.938.000	61.996.850	275.000.000	442.401.100	163.766.400	14.937.800	100	100	98	100	100	953.781.600	946.153.910
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BK	1.000.000	12.500.000	12.500.000	17.620.000	23.375.000	1.000.000	12.500.000	12.500.000	17.620.000	23.375.000	100	100	100	100	100	48.295.000	48.295.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				39.000.000					39.000.000					100		39.000.000	39.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	33.900.000	405.250.000	400.350.000	174.000.000	59.050.000	33.845.000	405.121.000	380.983.000	173.980.000	59.050.000	100	100	95	100	100	1.025.310.000	1.005.739.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	257.500.000	610.000.000	840.478.000	350.144.000	231.980.000	231.512.501	609.718.029	836.458.019	349.987.697	231.943.227	90	100	100	100	100	2.104.518.000	2.074.064.891
Sosialisasi/Penyuluhan/ Survei Lapangan/Monitoring Dalam Daerah				193.300.000	64.000.000				190.900.000	63.925.000				99	100	206.100.000	203.685.000
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS		4.031.400.000	5.141.520.000	5.645.400.000	5.075.400.000		3.210.900.000	4.914.920.000	5.157.520.000	5.057.494.025		80	96	91	100	15.833.400.000	14.294.838.805
Pembangunan Rumah Dinas					13.556.849.620					13.230.129.000					98	2.711.369.924	2.646.025.800
Pembangunan Gedung Kantor			5.746.095.000		2.598.644.000			5.627.480.000		2.563.830.000			96	99		6.265.823.800	6.140.246.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	495.000.000			175.000.000	610.000.000	492.469.000			174.286.544	600.760.000	99			100	98	792.000.000	786.927.544
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		150.000.000		21.000.000			150.000.000		21.000.000			100	100			171.000.000	171.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		60.338.000			102.000.000		60.338.000				-	100				60.738.000	60.338.000	
Pembangunan Perlengkapan Gedung Kantor			100.000.000					100.000.000					100			100.000.000	100.000.000	
Pembangunan Peralatan Gedung Kantor			269.750.000					269.750.000					100			269.750.000	269.750.000	
Pandamping Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	49.500.000										-					49.500.000	-	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	17.200.000	99.968.000	124.958.000	194.918.150	194.880.000	17.200.000	99.968.000	124.958.000	194.673.150	194.880.000	100	100	100	100	100	476.040.150	475.796.150	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Ops.	70.250.000	202.624.500	299.997.000	356.970.000	60.005.000	32.840.000	202.294.000	285.534.409	356.946.800	60.005.000	47	100	95	100	100	941.842.500	889.616.209	
Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor			2.500.000.000					2.495.555.000					100			2.500.000.000	2.495.555.000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		147.170.000					146.570.000					100				147.170.000	146.570.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				243.500.000	197.129.100				243.064.798	197.129.100				100	100	282.925.820	282.490.618	
Pelatihan Tenaga Pengelola Program Malaria			54.000.000	75.000.000	75.000.000			48.660.000	70.723.000	70.623.000			90	94	94	144.000.000	133.527.600	
Pelatihan Tenaga Pengelola Kusta Puskesmas			53.650.000					49.482.700					92			53.650.000	49.482.700	
Penetapan Angka Kredit Rumpun Kesehatan Jabatan Fungsional			42.350.000	40.600.000	57.187.000			42.350.000	40.600.000	56.603.800			100	100	99	94.387.400	94.270.780	
Pelatihan HIV-AIDS Secara Reguler				138.100.000					120.647.800						87	138.100.000	120.647.800	
Pelatihan Tentang TB DOTS				146.470.000					125.031.669						85	146.470.000	125.031.669	
Pelatihan Pengelola Imunisasi Puskesmas				88.000.000					82.192.000						93	88.000.000	82.192.000	
Pelatihan Tenaga Laboratorium Mikro dan RDT/OJT Puskesmas				75.000.000					70.084.200						93	75.000.000	70.084.200	
Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kesehatan Ibu dan Anak Bagi Bidan Desa				88.000.000	100.000.000				84.925.000	92.049.000					97	92	108.000.000	103.334.800
Pelatihan Bidan Penyelia Puskesmas				88.000.000					81.104.998						92	88.000.000	81.104.998	
Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN)				300.000.000	100.000.000				255.952.000	-					85	-	320.000.000	255.952.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelatihan Tenaga Kesehatan dan Guru TK Menjadi Tenaga Fasilitator Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)				71.900.000					71.900.000					100		71.900.000	71.900.000
Pelatihan Pengukuran Status Gizi				73.600.000					73.225.000					99		73.600.000	73.225.000
Pelatihan Pengelola Obat Puskesmas				95.000.000					88.619.000					93		95.000.000	88.619.000
Pelatihan Pelayanan Informasi Obat dan Penggunaan Obat Rasional				108.000.000					64.778.600					61		108.000.000	64.778.600
Pelatihan Tenaga Kesehatan Kerja				97.000.000					91.562.000					94		97.000.000	91.562.000
Pelatihan Pengembangan Obat Tradisional				130.900.000					125.586.000					96		130.900.000	125.586.000
Pelatihan Manajemen Puskesmas				155.260.000	174.053.000				150.148.800	128.453.000				97	74	190.070.600	175.639.400
Pelatihan TB Resistensi Obat					75.000.000					73.235.000				98		15.000.000	14.647.000
Pelatihan Sertifikat Penyuluhan Pangan Industri Rumah Tangga					176.160.000					124.125.000				70		35.232.000	24.625.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	19.750.000	45.000.000	45.730.000	15.000.000	-	19.750.000	45.000.000	45.730.000	15.000.000	-	100	100	100	100	138.460.000	113.460.000
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.918.560.000	1.400.000.000	5.029.470.000	2.282.674.000	3.745.493.000	2.873.604.502	1.400.000.000	4.278.696.440	2.188.123.060	3.581.497.280	98	100	85	96	96	12.380.002.600	11.456.925.458
Peningkatan Pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	113.500.000	200.000.000	280.000.000	3.500.000.000	4.000.000.000	85.690.000	195.900.000	265.250.000	3.389.303.077	3.972.841.846	75	98	95	97	99	4.893.500.000	4.730.711.446
Pendamping Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	291.666.000	140.000.000				270.097.698	132.300.000				93	95				431.656.000	402.397.698
Peningkatan, Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan		1.499.977.088					1.283.849.650					86				1.499.977.088	1.283.849.650
Desentralisasi Obat ARV				95.000.000					95.000.000					100		95.000.000	95.000.000
Pelayanan Ketermasyaiaan dan Perbekalan Kesehatan			700.003.000					698.670.000					100			700.003.000	698.670.000
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di PKM & Jaringan	8.022.800.000	5.000.000.000		1.750.000.000	1.500.000.000	5.875.621.700	1.275.568.600		1.742.927.000	1.499.319.000	73	26		100	100	15.072.800.000	9.193.981.100
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	2.320.478.370				350.000.000	1.933.993.380				198.895.000	83				57	2.390.478.370	1.973.772.380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Peningkatan Kesehatan Masyarakat	11.420.046.000	17.453.414.135	21.038.060.412	15.384.545.744	15.384.545.744	10.528.384.502	15.614.864.000	14.777.885.500	13.899.331.068	13.981.836.454	92	89	70	90	91	68.348.975.440	57.612.552.361
Pelayanan Kesehatan Penduduk Makin di PDM & Jaringan (L)		33.993.800					-					-				33.993.800	-
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan			3.599.182.000					3.302.148.500					93			3.599.182.000	3.302.148.500
Bantuan Operasional Kesehatan			4.511.000.000	9.498.278.000	11.295.792.000			2.812.514.427	6.702.798.000	8.799.172.126			62	71	78	16.256.436.400	11.275.146.852
Penyediaan Bahan Logistik				399.945.000					256.121.000					64		399.945.000	256.121.000
Peningkatan Kesehatan Masyarakat (L)			40.440.000					40.440.000					100			40.440.000	40.440.000
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan & Bahan	100.000.000					99.838.000					100					100.000.000	99.838.000
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat		928.800.000			100.000.000		928.800.000			100.000.000	100			100		948.800.000	948.800.000
Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Siaga Aktif					100.000.000					81.825.000					82	20.000.000	16.385.000
Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan	60.000.000		100.000.000			53.200.000		98.997.000			89		99			180.000.000	152.197.000
Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan	65.000.000	100.000.000				65.000.000	100.000.000				100	100				165.000.000	165.000.000
Pembangunan Area Smoking/Ruangan Merokok		480.000.000						-								480.000.000	-
Penyuluhan Berprilaku Beresiko Akibat Merokok, HIV/AIDS, NAPZA		135.000.000					56.800.000					42				135.000.000	56.800.000
Penyebarluasan Informasi Media Cetak Penyuluhan Promkes		641.236.980					641.116.000					100				641.236.980	641.116.000
Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Siaga Aktif		125.000.000					124.925.000					100				125.000.000	124.925.000
Produksi, Replikasi, Distribusi Buku Kesehatan Ibu Anak		256.000.000					255.550.000					100				256.000.000	255.550.000
Fasilitas Biaya PKL D3 Keperawatan				200.000.000	250.000.000				200.000.000	250.000.000				100	100	250.000.000	250.000.000
Sosialisasi Penggunaan Kelambu Kepada Masyarakat				97.510.000					96.280.000					99		97.510.000	96.280.000
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	700.000.000	600.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	696.160.000	599.810.000	500.000.000	487.535.000	489.850.000	99	100	100	98	98	2.400.000.000	2.381.475.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi	70.000.000	120.000.000	75.000.000			89.000.000	120.000.000	75.000.000				99	100	100		285.000.000	284.000.000
Monitoring, Pembinaan, Pengembangan Kampung Giga Alief		128.000.000	300.000.000				128.000.000	300.000.000					100	100		428.000.000	428.000.000
Swiping Pemberian Kapsul Vitamin Dosis Tinggi		127.350.000	100.000.000				125.700.000	100.000.000					99	100		227.350.000	225.700.000
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A				75.000.000	75.000.000				75.000.000	72.800.000				100	97	90.000.000	89.520.000
Gizi 1000 Hari Kehidupan				1.903.393.500	500.000.000				1.088.293.000	353.835.000				57	71	2.003.393.500	1.159.000.000
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat			280.480.000					280.475.000					100			280.480.000	280.475.000
Pengawasan hygiene dan Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan			25.000.000	125.000.000				24.675.000	117.299.834				99	94		150.000.000	141.974.834
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat			215.111.000					197.228.000					92			215.111.000	197.228.000
Penyelenggaraan Lingkungan Sehat (EHRA)			325.227.000					324.447.000					100			325.227.000	324.447.000
Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah	80.000.000	300.000.000	250.000.000	74.900.000	200.000.000	59.800.000	299.725.000	248.000.000	38.800.000	199.875.000	99	100	99	52	100	724.900.000	680.100.000
Pelayanan Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular	150.000.000	627.238.514	500.000.000			149.670.000	625.597.388	463.090.000			100	100	93			1.277.238.514	1.238.357.388
Peningkatan Imunisasi	200.000.000		213.400.000	75.000.000	75.000.000	198.150.000		213.200.000	60.150.000	74.800.000	99	100	80	100		503.400.000	488.450.000
Peningkatan Surveilance epid dan penanggulangan wabah	75.000.000		200.000.000	300.000.000	200.000.000	75.000.000		197.850.000	291.300.000	199.275.000	100		99	97	100	615.000.000	604.005.000
Penyelenggaraan Pelatihan Dalam Peningkatan Pelayanan imunisasi	63.520.000					62.509.000					98					63.520.000	62.509.000
Pelatihan Pengelola Program TB PKM (DOTS)	70.000.000					68.925.000					98					70.000.000	68.925.000
Pemberian Obat Massal Pencegahan Filariasis			275.552.000					78.139.750					28			275.552.000	78.139.750
Pembentukan TIM KIPRI			318.832.000					111.012.000					35			318.832.000	111.012.000
Penemuan dan Pengambilan Specimen Kasus AFP				88.000.000					47.150.000					54		88.000.000	47.150.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penemuan/Pelacakan Penderita Pneumonia				75.000.000					57.150.000					78		75.000.000	57.150.000
Penemuan/Pelacakan Penderita Diare Pada Bayi dan Anak Balita				75.000.000					70.000.000					83		75.000.000	70.000.000
Pemeriksaan Penderita TBC Semua Tipe				113.185.000					56.800.000					50		113.185.000	56.800.000
Pelacakan/Penemuan Pasien Lost to Follow Up Putus Berobat ARV				75.000.000					21.700.000					29		75.000.000	21.700.000
VCT Mobile Menemukan Pasien HIV Baru dan Diobati ARV				75.000.000	431.015.600				74.975.000	181.030.000				100	42	181.203.120	111.181.000
Pembiayaan Pemeriksaan Slide Malaria					60.800.000					17.600.000					29	12.120.000	3.520.000
Pelacakan/Penemuan Pasien Lost to Follow Up Putus Berobat TB				75.000.000					26.800.000					38		75.000.000	26.800.000
Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas				685.892.000	700.000.000				586.843.199	693.733.000				88	99	825.892.000	725.589.799
Penyusunan Standar Kesehatan	73.000.000	75.000.000	100.000.000				72.968.890	74.800.000	92.402.000			100	100	92		248.000.000	240.168.890
Pembangunan dan Pemeliharaan Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	70.000.000						67.368.000					96				70.000.000	67.368.000
Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pelayanan Kesehatan	290.000.000						289.360.800					100				290.000.000	289.360.800
Orientasi Praktek Kerja Lapangan D III Keperawatan/ Kesehatan	260.000.000						260.000.000					100				260.000.000	260.000.000
Penetapan Angka Kredit Rumpun Kesehatan Jabatan Fungsional	50.000.000						50.000.000					100				50.000.000	50.000.000
Pembangunan Puskesmas	4.827.280.000		16.942.901.000	15.738.116.600	30.124.433.000	4.827.259.900		16.903.662.000	15.709.140.000	29.821.506.047	100		100	100	98	43.533.164.200	43.384.383.109
Pengadaan Puskesmas Keliling			1.927.312.000	3.200.000.000	6.328.000.000			1.927.311.999	3.197.950.000	6.323.940.000			100	100	100	6.392.912.000	6.390.049.999
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	578.380.000		3.558.589.000	2.113.386.000	37.037.822.280	578.380.000		3.555.500.000	2.105.660.003	36.813.923.492	100		100	100	99	13.657.919.456	13.602.324.701
Pendamping Pembangunan Puskesmas	462.726.000					469.075.308						97				462.726.000	469.075.308
Pendamping Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	57.838.000					57.835.000						100				57.838.000	57.835.000
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas	957.633.800	7.768.210.000			745.350.000	956.793.000	7.768.210.000			695.700.000	100	100			93	8.874.913.800	8.864.143.000
Pengadaan Meubelair Puskesmas	129.424.700		499.030.000	135.200.000		129.000.000		499.000.000	135.200.000		100		100	100		783.854.700	783.200.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Peningkatan Puskesmas Pembantu Menjadi Puskesmas			7.193.580.000					7.182.980.000					100			7.193.580.000	7.182.980.000
Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap		230.395.000			11.973.408.100			215.322.600			7.680.856.025	93			64	2.625.076.620	1.751.493.805
Pendamping Rehabilitasi Sedang Berat Puskesmas		776.821.000						756.350.000				97				776.821.000	756.350.000
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Habis Pakai		800.000.000						796.000.000				100				800.000.000	796.000.000
Peatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita				216.000.000					180.270.700						83	216.000.000	180.270.700
Penyuluhan Kesehatan bg Ibu Hamil & Kel Krg Mampu	295.000.000			100.000.000	100.000.000	212.350.000			89.725.000	99.950.000	72			90	100	415.000.000	322.065.000
Perawatan Berkala bg Ibu Hamil dr Kel Krg Mampu	416.889.300		100.000.000	325.000.000	325.000.000	-		100.000.000	316.000.000	320.000.000	-	100	98	98		906.889.300	482.000.000
Perblongan Persalinan bg Ibu Hamil dr Kel Krg Mampu	287.000.000		352.000.000	225.000.000	150.000.000	-		351.949.800	183.600.000	115.600.000	-	100	82	77		894.000.000	558.709.800
Peatihan Fasilitator APN	276.000.000					277.688.000					100					276.000.000	277.688.000
Jaminan Persalinan Normal (JAMPERSAL)			1.648.930.000	2.054.969.000	2.671.280.000			481.999.800	1.196.527.001	2.199.146.691			29	58	82	4.238.175.000	2.118.356.139
Pengembangan Sistem dan Layanan Informasi Obat		435.100.000	937.500.000					434.800.000	937.000.000			100	100			1.372.600.000	1.371.800.000
Pendamping Pengembangan Sistem dan Layanan Informasi Obat		43.510.000						26.140.000				60				43.510.000	26.140.000
Penyusunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Manajemen Pusat Kesehatan (E-Puskesmas)			997.200.000	425.466.400				997.000.000	424.000.000				100	100		1.422.666.400	1.421.000.000
Pengkajian Dampak Lingkungan					1.396.696.000					704.160.000					50	279.739.200	140.832.000
JUMLAH	44.599.127.676	55.030.269.733	98.537.665.535	81.154.280.773	162.710.966.547	39.662.210.763	47.644.938.927	86.988.621.239	72.532.729.594	150.734.394.447	89	87	88	89	93	311.863.757.037	276.975.579.303